



PENGUKUHAN GURU BESAR TETAP

Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si.

Orasi Ilmiah:

*"Melawan Korupsi Ilmu:
Trajektori Sains Terbuka dan
Psikoinformatika"*

29 Maret 2023

MELAWAN KORUPSI ILMU

Trajektori Sains Terbuka dan Psikoinformatika

Juneman Abraham

Yang saya hormati,

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah III, Ibu Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.;
- Ketua Yayasan Bina Nusantara, Bapak Ir. Bernard Gunawan;
- Pimpinan BINUS Higher Education, Bapak Stephen Wahyudi Santoso, BSE, M.SIST., CBDMP, beserta jajaran;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Bina Nusantara;
- Rektor BINUS University, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M.;
- Guru Besar Tamu, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Prof. Drs. Koentjoro Soeparno, M.B.Sc., Ph.D., Psikolog;
- Guru Besar Tamu, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog ;
- Guru Besar Tamu, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, 3. Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog;
- Direktur Penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Bapak Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, S.I.K., S.Psi., M.H.;
- Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Bapak Dr. Andik Matulesy, M.Si., Psikolog, beserta jajaran;
- Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia dan Rektor Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Pdt. Dr. Erastus Sabdono, M.Th.;
- Penasihat Ikatan Psikologi Sosial - Himpunan Psikologi Indonesia, Prof. Dr. Mochamad Enoch Markum;
- Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bapak Dr. Bagus Takwin, M.Hum.;
- Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia, Prof. Dr. Yusti Probowati Rahayu, Psikolog, beserta jajaran;
- Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia Periode 2007 sampai dengan 2014, Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.;
- Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Bapak Dr. Widura Imam Mustopo, M.Si., Psikolog.;
- Para Guru Besar Universitas Bina Nusantara;
- Para Wakil Rektor, Para Dekan Fakultas/Schools, dan Ketua-Ketua jurusan;
- Rekan-rekan dosen dan para wakil mahasiswa;
- Ibu & BINUSIAN Leaders dan seluruh BINUSIAN;
- Ibu & Bapak Pimpinan Partner Industri;
- Keluarga dan kerabat terkasih;
- Para tamu undangan sekalian.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera, Syalom, Om swastiastu, Namu budaya, Salam kebijakan bagi Ibu-Bapak semua. Perkenankan saya menyampaikan Pidato Pengukuhan saya sebagai Guru Besar.

"A man who has never gone to school may steal a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad."

- Theodore Roosevelt

Ibu/Bapak, Hadirin yang saya hormati,

Korupsi – penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan (*entrusted power*) untuk meraih kepentingan privat (Transparency International, n.d.) – tak pelak merupakan masalah kronis bangsa kita, bahkan Gie (2004) menandakan kejahatan luar biasa ini sebagai akar seluruh permasalahan bangsa. Berbagai disiplin ilmu telah dan terus berkontribusi menjelaskan korupsi sebagai sebuah gejala kompleks, menerangkan jenis-jenis, faktor-faktor yang berpengaruh, proses hingga dampak sistemik yang ditimbulkan; termasuk psikologi.

Akan tetapi ungkapan *simpler is beautiful*, yang sejalan dengan sebuah prinsip ilmiah, yakni parsimoni (kehematan), menginspirasi orasi ini untuk memilih pintu masuk dalam menjelaskan dan menawarkan jalan melawan korupsi. Tesis dari orasi ini adalah bahwa ***melawan korupsi adalah melawan korupsi ilmu.***

Pijakan awal dari tesis tersebut adalah sebuah statistik yang dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Kompas.com, 2021), bahwa 86% dari total 1298 koruptor (terpidana korupsi) di Indonesia berpendidikan minimal sarjana (lulusan perguruan tinggi). Tidak mengherankan; orang berpendidikan lebih tinggi (baca: lebih berilmu) lebih mungkin berinteraksi dengan pejabat publik (tersedia peluang lebih besar terjadinya korupsi), atau menjadi pejabat publik itu sendiri.

Di samping itu, mereka cenderung memiliki penghasilan yang lebih baik dan, untuk mereka, waktu yang lebih singkat/instan untuk memperoleh layanan publik menjadi lebih berharga, yang dapat dibantu dengan suap. Kedua hal tersebut menjadi argumen Kaffenberger (2012) ketika menjelaskan temuan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan partisipasi dalam korupsi di Afrika Sub-Sahara.

Sepanjang tahun 2017 hingga 2022, terdapat kasus yang mengindikasikan tautan antara korupsi seorang pejabat publik - yang merugikan negara 4,3 triliun rupiah (Amindoni, 2018) - dan dugaan plagiat karya ilmiahnya. Meskipun tidak terbukti secara hukum di tingkat Peninjauan Kembali (Saputra, 2022), namun Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sempat menyatakan adanya temuan tentang plagiasi itu (Purnamasari, 2017). Dalam paradigma perilaku sekuensial, hal ini disebut gejala keajekan moral (*moral consistency*), yaitu sebuah perilaku imoral dilakukan setelah perilaku imoral lainnya (APA.org, 2023).

Penjelasan individual dan interaksional dapat dilengkapi dengan penjelasan institusional. Dalam sebuah dokumen bertajuk *Corrupt Schools, Corrupt Universities* yang diterbitkan International Institute for Educational Planning (IIEP), UNESCO, Bray (dalam Hallak & Poisson, 2007) menyampaikan keprihatinan bahwa pendidikan merupakan sumberdaya yang rentan dikorupsi,

relevansi dan kualitasnya seringkali dipertanyakan, efisiensinya rendah, pemborosannya tinggi, serta tujuannya tidak jelas.

Bray menambahkan, para wajib pajak maupun donor di berbagai belahan dunia seringkali mempertanyakan justifikasi dan legitimasi dari penyaluran dukungan finansial kepada lembaga pendidikan karena fakta menunjukkan maraknya penipuan akademik (*academic fraud*) maupun penyimpanan dalam perilaku pengadaan barang dan jasa (*procurement*) dalam sektor pendidikan.

Di Indonesia, terminologi *korupsi akademik* diantaranya diangkat oleh Abraham dan rekan-rekannya ketika (1) membahas gejala praktik “bagi-bagi nama” (*gift authorship*) dalam penulisan artikel jurnal ilmiah yang dipoles dengan bahasa “gotong royong”, “kolaborasi”, dan “supervisi” (Abraham, dalam Bernas.id, 2017), (2) mendefinisikannya sebagai “sebuah payung istilah yang menunjukkan perlawanan terhadap integritas, meritokrasi (sistem penghargaan kepada yang layak), dan nilai-nilai moral pendidikan, serta peruntuhan demokratisasi pengetahuan” (Abraham et al., 2019, para. 28). Menghampiri definisi legal dari korupsi, Abraham et al. (2019) menjelaskan lebih lanjut gejala korupsi akademik, sebagai berikut:

“Dalam dunia publikasi ilmiah, korupsi akademik dapat berwujud adanya kelompok-kelompok orang di luar komunitas ilmiah (seperti akreditor, administrator, bahkan komite fakultas) yang memiliki kekuasaan dan menentukan nilai, kontribusi, harga (*price*), dan dampak dari gagasan yang terbit di jurnal.... bila disandingkan dengan celah industrialisasi dalam dunia pendidikan, sitiran abusif, dan otoritas palsu, menghadirkan potensi korupsi akademik itu” (para. 29).

Lebih rumit lagi, riset-riset tentang korupsi di lembaga pendidikan sendiri seringkali terkendala narasumber anggota lembaga yang memilih bungkam karena takut terhadap akibat negatif yang dapat ditanggung apabila bersuara (Sabic-El-Rayess & Heyneman, 2020).

Dewasa ini, sebuah indikasi mengenai kuatnya relasi antara pendidikan dan perilaku korupsi adalah pencucian uang (*money laundering*) yang erat dengan utilisasi dunia digital. Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan bahwa salah satu modus pencucian uang di Kementerian di Indonesia adalah pembuatan perusahaan cangkang (*shell corporation*) untuk menimbun uang (Kompas.com, 2023).

Inti dari tindakan pencucian uang adalah konversi (di atas kertas) uang yang berasal dari kejahatan (*money originating from crime*) menjadi uang yang diperoleh secara sah (*legally obtained money*). Pencucian ini merupakan proses transformasi kertas atau digital yang menyangkut penciptaan asal usul palsu (*the creation of a false origin*), di luar asal usul uang yang sebenarnya (*the real origin of the money*) (van Koningsveld, 2013).

Pencucian uang yang merupakan sebetulnya “kejahatan kerah putih” canggih yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang jauh lebih besar, tetapi juga mengancam demokrasi, hak-hak asasi manusia dan integrasi bangsa-bangsa, yang berkembang sangat pesat seiring evolusi teknologi yang tak terimbangi oleh hukum yang relevan (Boontanom, 2019).

Orang-orang yang kurang terpelajar diketahui lebih sulit dalam memproduksi dokumen yang dibutuhkan untuk pencucian uang (Canhoto, 2008), sehingga kejahatan yang demikian biasanya dilakukan oleh orang-orang terpelajar (di samping pengusaha yang canggih, atau orang-orang dari kelas atas) (Boontanom, 2019). Di era Revolusi Industri 4.0, teknologi memang menyediakan peluang baru untuk korupsi semacam itu – misalnya melalui situs web gelap, uang kripto, atau penyalahgunaan teknologi seperti pangkalan data terpusat (Adam & Fazekas, 2021).

Penciptaan “asal usul palsu” dalam tindak pencucian uang menunjukkan bahwa kepalsuan (*fakeness*) telah merasuki diri orang-orang terpelajar, bahkan kompetensi pun dipalsukan (*counterfeit competence*; Wakeman et al., 2019). Riset menunjukkan bahwa diri yang palsu dapat membawa kepada tingkah laku korupsi melalui mekanisme pembungkaman moral (J. Abraham et al., 2018a). Diri yang palsu (*counterfeit self*) merupakan diri yang mengkompromikan nilai-nilai moralnya agar dapat terlihat baik, umumnya guna memenuhi ekspektasi orang atau pihak lain di luar dirinya sehingga citra diri (*self-image*) tetap terlindung, sambil ia sendiri menyadari bahwa secara aktual dirinya tidaklah sebaik yang ditampilkan.

Caranya adalah dengan menampilkan (atau mencitrakan) tingkah laku yang seolah-olah terpercaya (*trust behavior*, misal, berbicara apa adanya) padahal di baliknya adalah niat untuk melakukan tingkah laku yang berlawanan (*opposite behavior*, misal, berbohong) - sehingga “resultan”-nya adalah mengekspresikan tingkah laku palsu (misal, meyakinkan orang lain bahwa semua yang diketahuinya sudah disampaikan dengan sebenarnya, padahal ia sedang menahan/menyembunyikan informasi tertentu) (Abraham et al., 2018b).

Ringkasnya, menjadi palsu berarti merepresentasikan kinerja seolah-olah lebih baik daripada yang sebenarnya ada sekalipun harus menggunakan cara-cara yang tidak sah (“*misrepresent their performance as better than it actually is... while ignoring the illegitimate means that inflated it*”) (Wakeman et al., 2019, p. 253).

Berdasarkan studi psikologis Abraham et al. (2018a), mereka yang palsu (*counterfeit/inauthentic people*) lebih cenderung menjalankan “manuver pikiran” (Moore, 2015) dalam rangka tiga hal. *Pertama*, melakukan misrepresentasi kognitif, dengan menunjukkan bahwa seolah-olah ada fondasi moral bagi tindakan yang justru tidak bermoral.

Lebih lanjut, memberikan penamaan yang “manis” (eufemistik) untuk tingkah laku koruptif (misal, mencurangi sistem akreditasi adalah aktivitas “tim yang baik” karena hasilnya untuk “kepentingan bersama”), dan “membagus-baguskan” sebuah tingkah laku yang tidak bermoral dengan mengatakan “ada yang jauh lebih tidak bermoral”, sehingga tindakan yang sekarang lebih dapat diterima dan “tidak perlu dibesar-besarkan”

Kedua menonaktifkan pengaturan diri sebagai agen moral, dengan melemparkan tanggung jawab atau mengkambinghitamkan pihak lain atas korupsi yang mereka lakukan. *Ketiga*, mengurangi distres moral diri sendiri dengan mendistorsi efek dari korupsi (misal, korupsi dari perusahaan yang sudah kaya tidak akan mengorbankan siapapun), menyalahkan korban korupsi (misal: masyarakat bisa dikorupsi oleh karena tidak menjaga diri mereka sendiri atau tidak baik dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat publik), bahkan melihat orang lain sebagai bukan sesama manusia (dehumanisasi; misal: “birokrasi busuk memang pantas dikorupsi”).

Dengan demikian, *proposisi pertama* dari orasi ini adalah: ***Korupsi berpangkal pada tindakan koruptif dari mereka yang berilmu.***

Sejumlah peneliti maupun praktisi telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi korupsi. Hallak dan Poisson (2007), misalnya, menyampaikan dua belas rekomendasi yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni (1) Transparansi, yakni penciptaan dan pemeliharaan sistem regulasi yang transparan; (2) Akuntabilitas, yakni memperkuat kapasitas manajemen untuk pertanggung-gugatan yang lebih besar, dan (3) Partisipasi sosial, yakni meningkatkan kepemilikan proses manajemen.

Transparansi ternyata bukan solusi paripurna kecuali didukung oleh akuntabilitas dan partisipasi sosial (Lindstedt & Naurin, 2010; Garcia, 2018). Sebagai contoh, inisiatif *open government data* tidak akan efektif apabila publik tidak memiliki kemampuan untuk memahami

data yang transparan tersebut, untuk menyikapi dan bertindak atas informasi yang terbuka (*partisipasi sosial*). Lebih lanjut, sekalipun publik memiliki kedua kapasitas tersebut, jika Pemerintah tidak tanggap terhadap masukan publik (*akuntabilitas*), maka transparansi tidak akan efektif dalam mengatasi korupsi. Korupsi malah menjadi sebuah rahasia terbuka (*open secret*).

Keterbukaan korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat sendiri. Studi Jeong et al. (2018), sebagai contoh, menemukan bahwa korupsi terbuka (*open corruption*) di pedesaan di India berfungsi sebagai bentuk pembayaran kinerja (*performance pay*) di mana korupsi menjadi cara terbaik kedua (*second-best solution*) agar talenta terbaik mau menduduki jabatan publik, di mana transparansi dan akuntabilitas tidak sanggup menjawab persoalan itu.

Di Indonesia, Ngatikoh et al. (2020) menyampaikan bahwa transparansi gagal dalam mencegah korupsi karena adanya benturan kepentingan, kesulitan penegakan, sikap dan perilaku aparatur yang masih belum memahami pentingnya transparansi, dan penerapan layanan transparansi informasi yang tidak standar.

Lebih mendasar lagi, Kim (2008) menyatakan bahwa bergerak menuju transparansi dalam pelayanan publik di Asia (termasuk Indonesia) merupakan sebuah "tugas yang sulit" (*a daunting task*). Governansi yang baik atau demokratis (*good or democratic governance*) masih merupakan retorika politik yang berjarak secara substantif dengan kenyataan sehari-hari.

Reformasi pada tingkat sosio-politik dan manajerial dibutuhkan. Akan tetapi, Kim mengangkat arti penting indigenisasi (*indigenization*) di kawasan Asia, karena banyak negara berkembang Asia merupakan negara pascakolonial, yang mewarisi sistem birokrasinya dari kekuatan kolonial atau pengaruh Barat.

Salah satu tantangan terbesar bagi negara-negara Asia di masa depan adalah bagaimana secara kritis mengulayati (*to indigenize*) pengetahuan tentang manajemen publiknya sesuai dengan konteksnya sendiri, bukan sekadar melakukan mimikri terhadap konsep *good governance* dari bekas penjajah.

Sebagai contoh, sejumlah studi menemukan bahwa di Asia, aspek-aspek seperti religiusitas, perasaan moral (*sense of morality*), kekuatan moral (*moral intensity*), keberanian moral (*moral courage*), pertimbangan relasi, dan komitmen pemimpin yang etis dalam membentuk kultur perlindungan terhadap para peniup peluit (*whistleblowers*) (Irawanto & Novianti, 2020) penting dalam mendukung keterlibatan aktif dari publik.

Dengan demikian, *proposisi kedua* dari orasi ini adalah: ***Transparansi merupakan syarat perlu (necessary condition) namun tidak cukup (sufficient) untuk mengatasi korupsi. Transparansi semata-mata dapat mengarah pada korupsi yang terbuka (open corruption) dalam masyarakat. Untuk itu, penting untuk (1) membangun pengetahuan (episteme) apakah korupsi itu, dan (2) mencari hal yang diboboti oleh masyarakat dalam membangun pengetahuan, sebelum berbicara bagaimana mengatasinya.***

Berbagai literatur tentang korupsi mengakui bahwa istilah *korupsi* memiliki kendala definisional. Tidak ada konsep tunggal mengenai korupsi dan penekanan definisinya berubah-ubah sepanjang sejarah.

Jafari (2022) menyimpulkan bahwa tidak ada kesepakatan apakah korupsi itu tercela atau, sebaliknya, bernilai. Tidak ada pula pusat (*center*) definisi yang stabil, sehingga relasi dalam korupsi juga tidak stabil. Relasi-relasi yang pernah ditekankan, misalnya korupsi adalah

persoalan (1) relasi antarmanusia, (2) relasi antara manusia dan Tuhan, (3) relasi antara manusia dan sistem peradilan, dan (4) relasi antara manusia dan kekuatan politik.

Kajian epistemologis Herry Priyono (2018) juga mencatat bahwa sejak zaman pra-modern (Zaman Kuno, Abad Pertengahan, Tradisi Islam, Zaman Renaissance), modern (Thomas Hobbes, Montesquieu, Adam Ferguson, Adam Smith, Abad Reformasi, dan Reformasi), serta kontemporer, terdapat penekanan tematik yang berbeda-beda (bahkan diskontinu satu sama lain) tentang makna korupsi.

Definisi kultural tentang korupsi juga tidak universal, dalam arti pengertian budaya tentang (1) pembedaan antara barang publik dan privat, serta (2) hal yang diharapkan dari kebanyakan orang tentang hal yang perlu dilakukan jika berhadapan dengan kesempatan korupsi, sangatlah bervariasi (Rothstein & Torsello, 2013).

Riset empiris juga menantang pemahaman umum bahwa korupsi merusak *seluruh sendi* kehidupan. Sebagai contoh, dalam konteks industri/organisasi, penelitian lintas 132 negara berkembang menemukan bahwa korupsi memang merusak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Akan tetapi, pada tingkat firma/*enterprise*, korupsi ternyata meningkatkan kinerja (Williams et al., 2016); sejalan dengan paradigma psikologi pilihan rasional, namun aplikasinya pada tingkat perusahaan. Sedangkan pada konteks komunitas, di negara seperti Papua Nugini, sejumlah jenis korupsi, berskala-kecil, dianggap masyarakatnya sebagai fungsional dan bermanfaat sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi mereka yang terpinggirkan dari manfaat-manfaat yang dapat diberikan negara (Walton, 2013).

Di tengah-tengah pluralitas definisi dan persoalan yang ditimbulkannya, hendaknya kita tidak terombang-ambing, karena keterombang-ambing akan semakin menyulitkan kita semua dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dalam kaitan dengan perkembangan pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk psikologi, patut disimak ajakan Herry Priyono (2018) mengenai pentingnya mengeksplorasi kembali makna-makna korupsi “yang lama” dan menimbang ulang “yang baru” agar lebih presisi dan akurat dalam memahami korupsi. Ia menambahkan, yang menjadi pokok persoalan adalah “bagaimana menanam dan menjahit kebijakan/gerakan anti-korupsi dalam kekhasan corak dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kultural suatu masyarakat” (Herry Priyono, 2018, p. 346).

Pernyataan Herry Priyono mengimplikasikan bahwa setiap masyarakat tentu memiliki bentuk korupsinya masing-masing, sehingga tidak tepat menggunakan pengukuran tunggal (*single measure*) – seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diproduksi Transparency International – untuk menentukan kekoruptifan sebuah negara.

Ang (2020) mengingatkan kita dalam hal ini, “Alih-alih bertanya ‘Negara mana yang paling (atau paling sedikit) korup?’, baik analis maupun praktisi harus mempertimbangkan serangkaian pertanyaan yang berbeda: ‘Negara mana didominasi oleh jenis korupsi apa? Mengapa? Dengan konsekuensi apa? Bagaimana kita bisa memerangi berbagai jenis korupsi?’”. Misalnya, menempatkan Indonesia lebih tidak koruptif dibandingkan Nigeria berdasarkan IPK tidaklah akurat. Berdasarkan *Unbundled Corruption Index* (UCI) yang dibangun Ang (2020), Indonesia jelas lebih koruptif daripada Nigeria dalam hal *access money* (pertukaran elit kekuasaan dan kekayaan yang dilegalisasi dengan kebijakan, atau dikenal sebagai korupsi politik), sedangkan Nigeria lebih koruptif daripada Indonesia dalam hal *grand theft* (korupsi besar).

Dengan demikian, *proposisi ketiga* dari orasi ini adalah: ***Terdapat kendala epistemologis (keterbatasan cara mengetahui) dalam menentukan kekoruptifan sebuah tindakan.***

Dalam orasi ini, kendala epistemologis diposisikan sebagai kendala terbesar dalam melawan korupsi. Asumsinya, korupsi sulit dilawan karena dalam kehidupan berbangsa, tidak ada pijakan di tengah pusaran kontestasi epistemologi korupsi; sementara definisi yuridis dari korupsi (penyalahgunaan kekuasaan publik, atau kekuasaan yang dipercayakan, untuk meraih kepentingan pribadi) sangat menyempitkan makna korupsi.

Di satu sisi, kita membutuhkan batasan definisional sebagai prasyarat bagi penanganan hukum maupun metodologi riset (Herry Priyono, 2018). Kendati demikian, membatasi “korupsi itu apa” akan menimbulkan bias-bias, seperti bias negara-sentris dan bias ekonomi-sentris. Dilema tersebut secara pragmatis akan membawa pada hierarki prioritas. Dijelaskannya, “Misalnya, bisa saja untuk jangka waktu tertentu, penindakan menaruh penyelewengan keuangan di lembaga pemerintah (dan bukan bentuk korupsi lain) sebagai prioritas tertinggi” (p. 37).

Kendati demikian, pembiaran kendala epistemologi dengan menyerahkannya pada pragmatisme penindakan sesungguhnya tidak adil bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana diungkap oleh Anwar Ibrahim (2022, p. 169) – sekarang Perdana Menteri Malaysia, epistemologi yang tidak adil akan membawa pada krisis (dalam konteks ini: krisis dalam melawan korupsi) [*cetak miring oleh penulis*]:

“Tindakan kita tidak adil karena epistemologi kita tidak adil. Kita rupanya dengan sengaja mengulangi proses yang menyebabkan krisis ini sejak awal... [*Untuk bersikap adil....*] perlu didorong penggabungan nilai-nilai dan pembobotan non-Barat dalam produksi pengetahuan global.... Hal itu memaksa kita untuk melakukan introspeksi yang serius: dari mana kita berasal sebagai Muslim [*Manusia*], ke mana kita akan pergi, ke mana kita seharusnya pergi, dan ke mana kita berdiri bersama sebagai umat manusia”

Bandingkan dengan ungkapan seorang sastrawan Indonesia:

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan” (Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, 1975)

Williams (2021) menyatakan bahwa definisi yuridis korupsi yang digunakan saat ini merupakan definisi yang berasal dari Barat di mana pada tahun 1700-an, wacana tentang korupsi di Barat berkembang dari persoalan moralitas individual ke persoalan integritas kelembagaan yang lebih sistemik dalam jabatan publik.

Sebuah pernyataannya yang penting untuk bergerak maju dalam krisis epistemologis yang kita hadapi adalah: “Asumsi yang dibuat praktisi tentang ‘korupsi’ membuat perbedaan besar dalam tanggapan yang mereka pertimbangkan.... Selain menggarisbawahi pentingnya kolaborasi negara Utara-Selatan, hal ini menyiratkan bahwa baik analis maupun praktisi wajib terlibat dan menggabungkan perspektif dari beragam pemangku kepentingan” (p. 4, 5).

Sebagai *proposisi keempat* dari orasi ini, **Korupsi Ilmu adalah sebuah pengabaian terhadap kendala epistemologis, ketiadaan upaya untuk mengajukan penyelesaian yang koheren-kontekstual atas bias-bias epistemologis mengenai batasan korupsi, tanpa terjebak pada oversimplifikasi (terlampau menyederhanakan persoalan), dan hal ini mempengaruhi terjadinya korupsi.**

Ibu/Bapak, Hadirin yang saya berbahagia,

Dengan perkataan lain, **korupsi ilmu merupakan sebuah supresi (penindasan) informasi** yang disengaja yang tidak mendukung agenda atau narasi perlawanan terhadap korupsi, atau penyebaran informasi tentang korupsi yang dirancang untuk mempengaruhi opini publik atau mendukung sudut pandang tertentu sehingga pemahaman tentang korupsi dan tindakan terhadapnya tidak komprehensif dan tidak efektif.

Korupsi ilmu wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah korupsi. **Fase korupsi ilmu dimulai dari pembentukan ilmu sampai dengan penerapan ilmu.**

Jika kita berpijak pada konteks masyarakat Indonesia yang dikenal religius, maka agama (sebagai spiritualitas, moralitas) layak ditawarkan sebagai sumber epistemologi dalam menentukan batasan korupsi dan melawan korupsi. Di satu sisi kehidupan beragama memiliki sisi gelap, tetapi juga sisi terang baik dalam konteks Indonesia maupun global.

Pada sisi gelapnya, (1) sejumlah orang Indonesia “berpura-pura beragama” (“agama KTP”) (Merdeka.com, 2014) karena menjadi ateis dan berkepercayaan lain di luar agama resmi bukan pilihan di negara ini; (2) agama terbukti akhir-akhir ini menjadi alat politik identitas dalam meraih suara dalam pertarungan politik (Sari, 2016); (3) terjadi korupsi di Kementerian agama di Indonesia (Handoyo et al., 2019); (4) Agama (agama-dalam-situasi) dituduh menghasilkan ketidakadilan epistemik, misalnya, dengan menggabungkan kredibilitas epistemik dan spiritual dengan cara yang tidak menguntungkan bagi kelompok 'devian' (Kidd, 2017); (5) secara global, masyarakat yang religiusitasnya tinggi justru korupsinya juga tinggi (Gokcekus & Ekici, 2020), dan (6) Agama tidak berkorelasi langsung melainkan berinteraksi dengan keberadaan lembaga-lembaga demokratik dalam pengurangan korupsi (Sommer et al., 2013).

Pada sisi terangnya, (1) Agama menawarkan keutamaan-keutamaan (*virtues*) dalam menjalani hidup (Cochrane, 1999), (2) di Indonesia berkembang teologi pembebasan (Magnis-Suseno, 1984; Masyhuri, 2016), atau pada tingkat global, dikenal juga sebagai *decolonial theology* (Kunnummal, 2017; Tonelli, 2020), yaitu teologi yang memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Lagipula, Indonesia dinilai masih absen prioritas dalam strategi pencegahan korupsi, sebagaimana pernyataan Transparency International Indonesia (2021), “Absennya peran strategis Lembaga Anti Korupsi dalam skema pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia merupakan sebuah kemunduran” (para. 4).

Dalam konteks ini, wacana dari Marquette (2010) menjadi relevan. Ia menyampaikan pertanyaan, “*Should morality and ethics be (re)injected into definitions of corruption? Is there a discursive relationship between morality, religion and corruption (and why does this matter)?*” (Haruskah moralitas dan etika dimasukkan (kembali) ke dalam definisi korupsi? Apakah ada hubungan diskursif antara moralitas, agama, dan korupsi (dan mengapa ini penting?).

Dalam bahasa yang berbeda, Marquette (2010) mengulangi pertanyaan tersebut dalam makalah yang sama, untuk menunjukkan bahwa yang diharapkan dari agama adalah moralitas horizontal/publiknya, “*whether or not a (re)injection of public morality, if not religion, into discourses on governance, ethics and corruption might represent a useful way forward for academics and policy-makers*” (apakah injeksi (kembali) moralitas publik, jika bukan agama, ke dalam wacana tentang pemerintahan, etika, dan korupsi mungkin merupakan jalan maju yang berguna bagi akademisi dan pembuat kebijakan).

Paradoksnya, secara sosio-historis, korupsi sudah dipahami sebagai perkara moral sebelum lahirnya ilmu sosial modern. Paradoks ini semakin urgen ditelaah karena definisi yuridis maupun definisi sektor publik ternyata tidak memadai untuk memahami multidimensionalitas korupsi. Di

samping itu, dikotomi antara moral publik dan moral privat seringkali menjadi persoalan yang harus ditilik dengan hati-hati sebagai implikasi yang perlu diantisipasi dari mengembalikan agama sebagai sumber epistemologi moral dari korupsi. Sebagai bahan banding, situasi di Nigeria (Smith, 2005, p. 7) berikut ini patut diperhitungkan:

“Ketika orang Nigeria berbicara tentang korupsi, mereka mengacu tidak hanya pada penyalahgunaan jabatan negara untuk beberapa jenis keuntungan pribadi tetapi juga pada keseluruhan perilaku sosial di mana berbagai bentuk penipuan yang dipertanyakan secara moral memungkinkan pencapaian kekayaan, kekuasaan, atau prestise serta ambisi yang lebih duniawi. Gagasan korupsi Nigeria mencakup segala sesuatu mulai dari penyuaipan dan korupsi pemerintah, pemilihan yang curang, dan kesepakatan bisnis yang curang, hingga penyalahgunaan kekuatan gaib yang kejam, perdukunan medis (*medical quackery*), kecurangan di sekolah, dan bahkan menipu kekasih”

Dengan demikian, *proposisi kelima* dari orasi ini adalah **Agama (sebagai moralitas publik, bukan sebagai 'organized religion') dibutuhkan untuk menyempurnakan epistemologi korupsi di Indonesia.**

Sebuah studi kualitatif di Indonesia (Khoirin & Junaedi, 2022) menunjukkan bahwa meskipun tidak ada korelasi antara religiusitas dan perilaku tidak etis, persisnya “*The assumption that has been understood so far that politicians or officials who have a high level of religiosity also have a high anti-corruption attitude has not been proven*”, namun disebutkan bahwa agama berinteraksi dengan faktor lain yang melestarikan korupsi, yakni motivasi politik untuk menginginkan kekuasaan, sistem politik yang berbiaya tinggi, gaya hidup hedonis, sistem penegakan hukum yang tidak adil, hukuman yang tidak jera dan budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat. Lagi pula, ada kritik bahwa studi-studi yang tidak menemukan tidak adanya hubungan antara agama dan korupsi kemungkinan besar terbatas secara konseptual dan metodologis, atau lemah dalam berteori.

Yang menjadi masalah dari studi-studi tentang peran agama sebagai sumber epistemologi moral (termasuk pendefinisian korupsi) adalah keterjebakan dalam ketegangan antara teologisasi vs. sekularisasi (dalam konteks Psikologi, pernah diteliti oleh J. Abraham & Rufaeadah, 2014). Padahal, dewasa ini, sebagaimana ditunjukkan oleh para pemenang Nobel Templeton, agama dan ilmu perlu saling berkomunikasi sehingga tidak saling mengkorupsi, melainkan saling menunjang.

Kita dapat menyimak ungkapan dari dua pemenang nobel tersebut, sebagai berikut [cetak tebal oleh penulis]:

*“In studying how the world works, we are studying how God works, and thereby learning what God is I chose to study this partly to fill the void that was left when I realized I could no longer accept the dogmas of the Catholic Church that had meant a lot to me as a teenager. Those dogmas include claims about **how things happen that are particularly difficult to reconcile with science.** But more importantly, the world is a bigger, older and more alien place than the tribalistic account in the Bible. There are some claims about ethics and attitudes about community that I do find valuable, but they cannot be taken as pronouncements from “on high.” I think I have now gathered **enough wisdom and life experience that I can revisit all this with real insight.**”* (Frank Wilczek, dalam Merali, 2022).

“The God of the Bible is also the God of the genome ... He can be worshipped in the cathedral or in the laboratory” (Francis Collins, dalam Horgan, 2020).

Dalam konteks itu, orasi ini mengusulkan bahwa agama (sekali lagi, sebagai spiritualitas dan moralitas publik) sangat strategis untuk memunculkan proposisi yang tegas yang dapat dipegang semua pihak, dalam menjawab pertanyaan, "**Manusia terkorupsi (corrupted) ketika apa?**", dan dalam hal ini agama berinteraksi dengan filsafat manusia dan – turunannya – Psikologi, pertama-tama karena sama-sama berkepentingan untuk menjawab pertanyaan "Siapakah manusia itu?".

Orasi ini tidak hendak menjawab secara paripurna (baca: tergesa-gesa) untuk menjawab pertanyaan tentang struktur fundamental manusia itu. Akan tetapi, menggunakan pendekatan pluralisme teoretis, orasi ini mengusulkan dua hal mengenai konsep manusia terkorupsi (*corrupted people*), yakni (1) Manusia yang terhambat teraktualisasikan dirinya, dan (2) Manusia yang tidak otentik; yang keduanya saling terkait.

Hal pertama mengenai konsep manusia terkorupsi diusulkan berasal dari konsepsi dari Abraham Maslow, Pendiri Psikologi Humanistik. Maslow diangkat di sini karena ia merupakan salah seorang psikolog sekaligus cenderung berbicara tentang filsafat dan cukup menonjol berbicara tentang pengalaman keagamaan. Pendapatnya yang penting dalam konteks orasi ini adalah,

"Rasa religius merupakan sebuah fenomena kodrati dan normal yang pemekarannya sebisa mungkin harus didukung Agama-agama resmi bersalah sekali *jika mau* memonopoli pengalaman religius lewat semacam kewibawaan eksklusif Karena agama-agama resmi terlalu cenderung untuk mengorganisir serta mengatur pelaksanaan dan ekspresi religius, maka akibatnya adalah membuatnya kaku dan lumpuh" (Maslow, sebagaimana dikutip dalam Leahy, 2002, p. 150)

Menindaklanjuti kalimat terakhirnya dalam kutipan di atas, Maslow mengusulkan sebuah sintesis antara agama dan ilmu; lebih tepatnya kolaborasi antara spiritualitas Timur, yaitu Taoisme, dengan sains. Menurutnya, para psikolog Barat hendaknya belajar dari "*taoistic fashion*" or "*taoistic let-be*" or "*taoistic listening*" ketika menggali tentang kemanusiaan (DeCarvalho, 1991).

Maslow menggambarkannya sebagai pendekatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk melengkapi sains Barat. Ia berargumen bahwa metode pengorganisasian, klasifikasi, dan konseptualisasi sains Barat "memindahkan" persepsi kita tentang kenyataan ke alam abstraksi (yang ditemukan oleh pikiran). Aspek negatif dari sains Barat ini harus diimbangi dengan penerimaan dan kontemplasi pengalaman taoistik yang bersifat tenang (*non-intruding*) (DeCarvalho, 1991).

Atas dasar itu, Maslow mengembangkan konsep *Taoistic Science*, yang bercirikan reseptivitas atau penerimaan terhadap pengetahuan, pengertian (*understanding*) sebagai tujuan utama sains, penggunaan empati yang lebih bebas, dan penekanan yang lebih besar pada pengetahuan yang dialami (*experiential knowledge*) (Clippinger, 1973).

Hanya melalui Sains Taoistik – yang merupakan antonim dari Sains yang Mengontrol (*controlling science*) – inilah, pengalaman manusia (*human experience*) dapat secara sejati dipahami (Compton, 2018). Jelasnya, salah satu karakteristik dari Sains Taoistik adalah:

"*Real receptivity of the Taoistic sort is ... to be able to listen—really, wholly, passively, self-effacingly listen—without presupposing, classifying, improving, controlling, evaluating, approving or disapproving ... such listening is rare*" (Maslow, 1966, p. 96).

Sains Taoistik ini memfasilitasi aktualisasi diri, bahkan kualitas Taoistik itulah yang merupakan kualitas dari orang yang teraktualisasikan dirinya:

"Sepanjang tulisan Maslow, dia sering menghadapi tantangan yang sulit untuk menggambarkan karakteristik pengalaman dan perilaku orang-orang yang mewujudkan

visinya tentang kesehatan mental yang optimal, berkembang, dan aktualisasi diri. Maslow sering menggunakan istilah 'Taois' ketika ia berusaha untuk mengkomunikasikan kualitas-kualitas tersebut kepada pembaca

Maslow mengidentifikasi berbagai kondisi mental dan usaha manusia yang mampu memiliki kualitas 'Taoistik' Karakteristik dan perilaku kepribadian yang Maslow sering digambarkan sebagai 'Taoistik' juga dapat dilihat di banyak dari 15 karakteristik yang ia kaitkan dengan orang yang sangat mengaktualisasikan diri." (Hoffman & Compton, 2022, p. 5-6)

Kembali ke pertanyaan, "**Manusia tekorupsi ketika apa?**". Maslow memang tidak pernah menggunakan kata *korupsi*. Kendati demikian, dalam perspektif Taoistik, Maslow menunjukkan bahwa salah satu karakter dari orang yang "mengaktual" (*self-actualizing*) adalah tidak egosentris (*ego centered*) – dalam bahasa lain: tidak elitis [*Elitisme* dimaksud adalah sebagaimana digambarkan oleh gaya hidup kelas menengah ke atas dengan jumlah pendapatan tertentu untuk dihabiskan dan waktu senggang untuk "berfokus pada diri sendiri"] (Compton, 2018), melainkan berfokus pada masalah sosial yang perlu diselesaikan yang menjadi misi hidupnya (*problem centered*). Jelasnya, ciri orang yang mengaktual:

"Subjek kami pada umumnya sangat terfokus pada masalah di luar diri mereka. Dalam terminologi saat ini, mereka berpusat pada masalah daripada berpusat pada ego. . . orang-orang ini biasanya memiliki beberapa misi dalam hidup, beberapa tugas yang harus dipenuhi, beberapa masalah di luar diri mereka yang membutuhkan energi mereka." (Maslow, 1970a, 1970b, p. 159)

Bagaimana manusia dapat menjadi *tidak* mengaktual, terserap pada ego, dan tidak mampu berfokus pada masalah di luar diri (*problem centered*)? Dari sisi diri: Bila manusia tidak mampu menerima diri apa adanya, melainkan menyangkal, menekan, atau memproyeksikannya, serta tidak mampu meningkatkan empati dan kasih sayang (terhadap diri sendiri dan orang lain) (Bland, 2020). Dari sisi kontribusi lingkungan: jika **kapasitas dan talenta manusia mengalami tekanan (supresi atau represi) baik secara psikologis maupun kultural** (DeCarvalho, 1991). **Dalam kondisi inilah, manusia terkorupsi.**

Untuk itu, Maslow menekankan "*proper cultural environment*" (lingkungan kebudayaan yang tepat) yang harus diciptakan oleh sebuah masyarakat yang sinergis yang memungkinkan manusia mengaktualisasikan kapasitas dan talentanya itu. Dengan perkataan lain, **pelaku korupsi (Koruptor)** – dapat individu, kelompok, atau masyarakat – adalah mereka yang mengkorupsi manusia lain dengan menghadirkan tekanan-tekanan yang **menyebabkan seseorang menjadi tidak otentik.**

Menurut sebuah tafsir agama Islam, diri otentik (*authentic self*) terkait dengan keadilan. Istilah '*Abd Allah* (Abdi/Pelayan Allah) digunakan di dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan *dapat menjadi apa* manusia itu (menunjukkan bahwa identitas manusia bersifat dinamis dan 'menjadi'/*becoming*) – bukan hanya siapa manusia itu (*being*; yang diistilahkan sebagai *Insan*) (Kazmi, 2000).

Terjemahan umum dari '*Abd Allah* adalah hamba Allah. '*Abd Allah* mewakili diri otentik manusia, yang menyadari keadilan dalam hidupnya dengan membuat perbedaan antara "aku" (*me*) dan "daku/milikku" (*mine*) dan menundukkan semua hubungan menjadi hanya satu, yaitu hubungan dengan Allah. Namun hubungan dengan Allah adalah sebuah proses yang membutuhkan usaha dan kewaspadaan yang terus-menerus dalam berusaha mempertahankan perbedaan antara *aku* dan *daku* (Kazmi, 2000). Lebih jelasnya mengenai perbedaan ini [**cetak tebal** oleh penulis]:

*“The relationship that 'Abd has to Allah is, as said earlier, not external to his/her self-identity but rather constitutive of it. This helps explain **the difference between 'me' and 'mine'**. What I intrinsically and truly am is defined by my relationship to Allah. What I own, possess or acquire cannot therefore be constitutive of me. My relationship to Allah to be genuine has to be primary and fundamental and exclude all other relationships. My relationship to Allah cannot, therefore, be one of several relationships that define me.*

The goods I publicly consume and display and the talents I openly exhibit do not constitute me. They are accidents that happened to me as they are not entirely in my control.... The efforts directed at the maintenance of the distance between the two, therefore, are social and political in nature. In order to maintain the distinction 'Abd has to engage in social and political activity.... A society that fails to recognize the distinction between 'me' and 'mine' cannot be truly a just society.” (Kazmi, 2000, p. 377, 390, 397)

Sebagai konsekuensinya, kesadaran diri yang tidak dimediasikan oleh penerimaan akan eksistensi Allah, dari sudut pandang agama (Islam; *tidak hanya Islam* tetapi diduga juga ada pada agama lainnya), akan menjadi kesadaran diri yang tidak otentik. Ego seseorang memang terbukti efektif dilayani oleh kepalsuan/ketidakotentikan diri (Wakeman et al., 2019). Tak heran, mereka yang tidak otentik akan mengacaukan pengertian antara ‘aku’ dan ‘daku/milikku’ demi memuaskan egonya; di sinilah pangkal kekoruptifan manusia.

Dengan demikian, *proposisi keenam* dari orasi ini adalah ***Agama (sebagai spiritualitas dan moralitas publik, bukan sebagai ‘organized religion’) berkolaborasi dengan sains psikologi dalam menyediakan epistemologi korupsi.***

Kesimpulan tentatif adalah bahwa manusia terkorupsi ketika kapasitas dan talentanya mengalami tekanan psikologis maupun kultural - dan berhadapan dengan itu - lalu menempuh jalan yang tidak sesuai dengan otentisitas dirinya, sehingga ia kesulitan membedakan antara ‘aku’ dan ‘daku/milikku’, serta menjadi tidak otentik (inauthentic self) dan tidak adil.

Dapat dikatakan bahwa epistemologi spiritual (cara kita mengetahui tentang korupsi berdasarkan spiritualitas) telah memberikan kita landasan untuk melawan ketidakadilan sejak dalam pikiran. Cara pandang kolaboratif antara sains dan agama telah membawa kita untuk lebih holistik sekaligus presisif mengerti tentang hal yang diharapkan dari manusia untuk menjadi *tidak* korup. Manusia perlu menyadari bahwa benda-benda yang dimilikinya seharusnya tidak menyusun pendefinisian dirinya, melainkan harus dihayati sebagai ‘aksiden’ untuk melaksanakan ‘proyek sosial politik’ guna mewujudkan keadilan sosial di dunia, berdasarkan lensa utuh dan penuh memandang relasi primernya dengan Yang Maha Kuasa.

Dari sudut pandang itu, kajian Kazmi (2000) terhadap spiritualitas Islam itu sesungguhnya sejalan dengan konsep *psychological decentering* (Ho, 1995) yang secara substantif juga dapat kita temukan dalam spiritualitas Timur, seperti Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan Hinduisme.

Psychological decentering merupakan oposisi dari *ego centered* (suatu ciri manusia yang tidak mengaktual, yang diulas oleh Maslow sebagai lawan dari *problem centered* – berorientasi ke luar diri untuk menyelesaikan masalah sosial). *Problem centered* berdekatan dengan konsep pertimbangan untuk orang lain (*consideration for others*) dalam Konfusianisme, dan pelupaan diri (*selflessness*) dalam Taoisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Menurut kajian Ho (1995),

psychological decentering merupakan penawar dari egosentrisitas (diri sebagai fokus pengetahuan) dan konservatisme kognitif (resistensi terhadap perubahan kognitif).

Dalam kaitan dengan psikologi korupsi, J. Abraham dan Gunawan (2014) menemukan bahwa pelupaan diri (*selflessness*) memprediksikan dalam arah positif rasa bersalah dan rasa malu yang fungsional untuk mengerem tingkah laku korupsi dalam kehidupan sosial.

Di tengah-tengah potensi besar epistemologi spiritualitas Timur ini dalam mendefinisikan kemanusiaan kita, sangat menarik untuk mengetahui dari biografi intelektual Abraham Maslow (DeCarvalho, 1991) bahwa:

“Maslow pertama kali mendengar tentang Taoisme dalam seminar Max Wertheimer di *New School for Social Research*. Pada awal 1949 dia menggunakan Taoisme untuk menggambarkan spontanitas yang disengaja dalam komponen ekspresif dari perilaku.... Ia juga mengeksplorasi kesamaan antara konsep Satori, Nirvana, pengalaman puncak, dan aktualisasi diri.” (p. 45)

Paradoksnya, dalam bukunya, *The Psychology of Science* (1966), Maslow malah mendedikasikan satu bab tersendiri untuk "sains taoistik". Apakah dengan demikian **Psikologi Maslow terkorupsi (corrupted)** jika ia tidak pernah mendengar tentang Taoisme? Dengan perkataan lain, akankah sang “manusia utuh yang teraktualisasikan” *a la* Maslow tidak akan pernah tercapai jika ia “terasing” dari Taoisme sebagai sumber epistemologi Timur? Lebih parah lagi, sekiranya sang “manusia utuh yang teraktualisasikan” tidak pernah terinspirasi oleh Taoisme, apakah Maslow (atau kita) telah meminggirkan atau mengeksklusi masyarakat non-Barat.

Dengan ulasan di atas, **krisis tentang manusia sesungguhnya adalah krisis tentang epistemologi**, dan kini diperumit dengan perkembangan teknologi, sebagaimana ungkapan Anwar Ibrahim (2022, p. 157):

“Ketidakadilan, kita semua sepakat, membingungkan kita pada tingkat epistemologis.... Krisis epistemologis yang tersembunyi di dalam kemunculan dan proliferasi media sosial, kecerdasan buatan, algoritme, dan pasca kebenaran (*post truth*), mengancam seluruh dunia dan membutuhkan dialog global dan kebijaksanaan kolektif untuk bernavigasi”.

Krisis epistemologi – khususnya krisis keadilan epistemologi - hendak coba dijawab, salah satunya oleh Sains Terbuka (*Open Science*), dalam mana Akses Terbuka (*Open Access*) menjadi bagiannya. Namun F. Piron (2017) mengingatkan bahwa Akses Terbuka dapat menjadi alat neokolonialisme jika hanya memberikan siswa dan akademisi akses yang lebih baik ke sains dari Negara-negara Utara.

Sebagai contoh, ada permasalahan konkret di francophone Afrika sub-Sahara di seputar Akses Terbuka. Akses Terbuka tidak terpisahkan dari masalah akses komputer, internet, hibah riset lokal, dan lemahnya literasi digital. Dalam konteks ini, Akses Terbuka hanya akan menguatkan hegemoni sains yang diproduksi dan terbit di Negara-negara Utara (*Global North*) dengan mengorbankan pengetahuan lokal yang jarang ada dalam akses terbuka. Gejala ini diterminologikan sebagai ketidakadilan kognitif (*cognitive injustice*).

Sesuai konteks negaranya, Piron (2017) menyarankan pengarsipan yang lebih baik, bukan pertama-tama akses terbuka:

“Akses Terbuka muncul sebagai alat neokolonial karena memfasilitasi dan mempercepat akses ilmuwan dari Negara-negara Selatan ke ilmu pengetahuan di Negara-negara Utara. Dengan demikian, Akses Terbuka berkontribusi untuk mengintensifkan **keterasingan**

epistemik para ilmuwan Negara-negara Selatan, dan ekstraversi sains dari Selatan ke Utara

Saat bepergian ke Afrika Barat, saya kecewa saat mengetahui bahwa ahli geografi Ouagadougou (Burkina Faso) mengetahui lebih baik tentang sains Eropa mengenai Sahel daripada karya Institut Sahel Tinggi di Maroua (Kamerun) yang tidak *online*, apalagi dalam akses terbuka.... Akses terbuka di Afrika harus beradaptasi dengan kenyataan ini [terlebih dahulu] dan berfokus pada pengarsipan institusional berkualitas baik, daripada publikasi di jurnal global/Utara.” (p. 3, 6)

Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah upaya dekolonisasi yang tepat sesuai dengan konteks masing-masing Negara Selatan. Sejalan dengan semangat dekolonisasi ini, Canadian Commission for UNESCO (2020), menyampaikan pokok pikiran bahwa Sains Terbuka (*Open Science*) tidaklah seterbatas *Open Access* (Akses Terbuka), yaitu membuat artikel dan data ilmiah tersedia sepenuhnya bagi para peneliti di seluruh dunia pada saat publikasi, sehingga para peneliti tidak melewatkan hasil penting yang dapat berkontribusi atau mempercepat pekerjaan mereka.

Melainkan, Sains Terbuka harus (1) memungkinkan warga di seluruh dunia untuk berkontribusi pada sains dengan kapasitas dan keahlian mereka, seperti melalui proyek sains warga (*citizen science*) atau penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*), (2) mencakup pluralitas cara mengetahui, termasuk kultur indigenus, budaya Negara-negara Selatan (*Global South*), dan kelompok terpinggirkan lainnya di Global North.

Tiga tahun sebelumnya, Piron (2017) sudah mengusulkan sejumlah langkah konkret, yakni bahwa karya-karya ilmiah hendaknya dibuat menjadi plurilingual (tersedia dalam bahasa-bahasa nasional selain ‘bahasa kolonial’), terbuka terhadap pluralitas epistemologi, dan tersedia secara daring dalam Akses Terbuka di bawah lisensi *Creative Commons*.

Piron juga mengusulkan untuk repatriasi (mengembalikan) ekosistem publikasi ilmiah ke lingkungan perguruan tinggi, dan menolak mediasi penerbit yang berorientasikan laba (*for-profit publishers*). Ia mengingatkan bahwa secara historis, di awal abad ke-20, sebelum mendominasinya penerbit-penerbit komersial, berbagi (*sharing*) artikel secara gratis adalah hal yang normal.

Akses terbuka harus mempertimbangkan pengetahuan dari Negara-negara Selatan yang tidak muncul di *Web of Science* (atau yang setara), dalam hal mana pengetahuan itu berharga dan relevan dengan banyak konteks dan semestinya dapat diakses secara bebas.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Anwar Ibrahim (2022, p. 169) mengenai kolaborasi epistemologis antara Timur dan Barat [cetak miring oleh penulis]:

“Perjalanan kita menuju keadilan epistemologis harus didasarkan pada pandangan Islam [*agama*] yang tercerahkan [*mewakili agama, tidak hanya Islam, sebagaimana diulas sebelumnya*], yang dihapus dari karikatur demonnya, dan juga pandangan Barat, yang dibebaskan dari ketidaktahuan berbasis rasa takut; sebagai rekan kerja yang setara – semacam *Covivencia* yang melepaskan jalan dunia dari permusuhan dan benturan menuju penciptaan pengetahuan yang terintegrasi, kolaboratif, konstruktif, dan kritis.”

Bahwa epistemologi Timur dan Barat hendaknya tidak saling menolak, melainkan saling mendukung, bahkan terintegrasi. Hal ini, dalam segi tertentu telah dicontohkan oleh Abraham Maslow dalam sintesis terminologinya, “*Taoistic Science*”, walau Maslow tidak terlepas dari kritik bahwa derajat filsafatnya kurang dibandingkan kompetensinya sebagai ahli psikologi (Leahy, 2002).

Dengan demikian, *proposisi ketujuh* dari orasi ini adalah bahwa **Kebutuhan kita akan integrasi Epistemologi Spiritual/Timur, seperti *Psychological Decentering* – yang membantu mencegah manusia terkorupsi – dapat difasilitasi oleh Sains Terbuka, sejauh tidak dimaknai sebatas Akses Terbuka. Sains Terbuka menyediakan sarana penciptaan keadilan epistemologis dengan mendorong repatriasi proses-proses dan ekosistem ilmiah kembali ke *khittah*-nya, sehingga praktik-praktik seperti penyediaan artikel multibahasa, praktik pengarsipan artikel di luar platform tertutup dan komersial, dengan lisensi terbuka, serta kegiatan “keroyokan” sains warga, hingga penelitian aksi partisipatif yang melibatkan populasi yang kurang terepresentasi, menjadi kebiasaan yang wajar saja.**

Kini kita mengetahui dengan lebih pasti bahwa Akses Terbuka hanyalah satu unsur dari Sains Terbuka. Canadian Commission for UNESCO (2020, p. 3) menyatakan bahwa bentuk-bentuk Sains Terbuka, adalah sebagai berikut:

“Opening access to scientific publications; Opening access to research data; Scientists’ participation in public debates and governance; Openness to public welfare issues and concerns (not just those of industry or governments); Openness to research partnerships with civil society associations and social movements ; Openness to hybrid knowledge, from citizen science to open makerspaces and laboratories; Openness to Indigenous knowledge and ways of knowing; Openness to knowledge from the Global South or marginalized communities in the Global North; Openness to the idea that science is made up of complex debates rather than enduring certainties.”

Sains Terbuka merupakan sebuah istilah payung yang mencakup praktik-praktik keterbukaan, seperti *open code, open data, open access, open innovation, alternative reputation systems, open notebooks, open lab books, science blogs, collaborative bibliographies, citizen science, open peer review, pre-registration* (Hofmann, 2022, p. 3). Secara lebih komprehensif, UNESCO (2021) mendefinisikan Sains Terbuka sebagai:

“Konstruk inklusif yang menggabungkan berbagai gerakan dan praktik yang bertujuan untuk membuat pengetahuan ilmiah multibahasa tersedia secara terbuka, dapat diakses dan digunakan kembali untuk semua orang, untuk meningkatkan kolaborasi ilmiah dan berbagi informasi untuk manfaat sains dan masyarakat, dan untuk membuka proses penciptaan, evaluasi dan komunikasi pengetahuan ilmiah kepada pelaku masyarakat melampaui komunitas ilmiah tradisional.

Perihal itu terdiri dari semua disiplin ilmu dan aspek praktik ilmiah, termasuk ilmu dasar dan terapan, ilmu alam dan sosial dan humaniora, dan dibangun di atas pilar utama berikut: pengetahuan ilmiah terbuka, infrastruktur ilmu terbuka, komunikasi sains, keterlibatan terbuka aktor masyarakat dan dialog terbuka dengan sistem pengetahuan lainnya.” (p. 7)

Akan tetapi, istilah Sains Terbuka sendiri sebenarnya merupakan sebuah pleonasme, oleh karena sifat sains sejatinya memang terbuka (J. Abraham, sebagaimana dikutip dalam Subagyo, 2022).

Salah satu pangkal yang merangsang gerakan Sains Terbuka adalah hasil-hasil riset empiris tentang manusia yang memiliki replikabilitas yang rendah, membuat sains tentang manusia tidak kokoh (*robust*); hal ini diatribusikan pada kebiasaan bersains yang tertutup (dan buruk). Gejala ini diistilahkan sebagai “Krisis Reprodusibilitas” (dalam orasi ini digunakan secara bersinonim dengan “Krisis Replikabilitas”, walau keduanya memiliki perbedaan nuansa arti bila dibedah secara lebih tajam, namun bukan fokus orasi ini).

Krisis reprodusibilitas merambah hampir seluruh bidang Psikologi. Dari bidang-bidang utama Psikologi, kita menjumpai kenyataan sebagai berikut.

Dalam bidang Psikologi Klinis: Hengartner (2018) menyampaikan bahwa relasi-relasi antar variabel psikologi klinis yang dilaporkan mengalami inflasi secara sistematis dan banyak hasil yang dipublikasikan tidak mampu direplikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa literatur psikologis ilmiah, termasuk psikologi klinis, penuh dengan temuan positif palsu (*false positive*).

Hengartner secara khusus menyampaikan dampak bias pelaporan (*reporting bias*, di mana peneliti hanya melaporkan hasil studi dan indikasi klinis tertentu demi memperoleh hasil yang signifikan sesuai harapan peneliti) terhadap psikoterapi. Ia mengutip sebuah studi yang dilakukan Cuijpers et al. (2010) yang melaporkan penurunan efikasi *cognitive-behavioral therapy* (CBT) sebesar 37% setelah penyesuaian bias publikasi ($d = 0,67$ vs $d = 0,42$ setelah memasukkan uji coba klinis yang tidak dipublikasikan/*unpublished trials*).

Tidak berhenti di sini; gejala krisis replikasi juga dihindangi fenomena "*selective reporting*" dan "*cherry picking*" (praktik yang disengaja untuk menyajikan hasil studi atau eksperimen yang paling mendukung hipotesis atau argumen, alih-alih melaporkan semua temuan) hingga membuat hasil-hasil meta-analisis pun tidak konsisten (tidak kredibel). Hengartner menemukan tiga hasil meta-analisis yang berbeda yang diduga terkait dengan "permainan" mengubah kriteria seleksi studi dan prosedur analisis data. Ketiga hasil meta-analisis itu terkait dengan perbandingan efikasi relatif CBT vs. terapi psikoanalisis: (1) terapi psikoanalisis lebih superior dari CBT, (2) terapi psikoanalisis tidak lebih superior dari CBT, (3) CBT lebih superior dari terapi psikoanalisis. Ia lalu bertanya reflektif, "Bila demikian, apa yang perlu kita sampaikan kepada klien kita? Mana yang lebih efektif, CBT atau psikoanalisis, jadinya?".

Tackett et al. (2019) mengusulkan sejumlah usulan untuk reformasi bagi penelitian psikologis klinis, termasuk material terbuka (*open materials*), data terbuka (*open data*), (pra)pendaftaran (*pre-registration*), Laporan Terdaftar (*registered reports*), dan kolaborasi multisitus baik untuk studi pengulangan (replikasi) maupun studi orosinal.

Dalam bidang Psikologi Pendidikan, meskipun belum menemukan secara spesifik hasil studi empiris tentang krisis reproduibilitas dalam bidang ini, Plucker dan Makel (2021) menemukan "tingkat replikasi yang rendah dalam basis penelitian psikologi, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pendidikan keberbakatan (*gifted education*), dan kriminologi yang diterbitkan, mulai dari 0,13% dalam pendidikan hingga 1,07% dalam psikologi" (p. 90).

Yang menarik, ada kritik yang merendahkan arti pentingnya reproduibilitas dalam psikologi pendidikan, dengan menyatakan bahwa, oleh karena anak-anak adalah unik dan memiliki pengalaman yang unik, maka sudah pasti tidak ada hasil yang dapat direplikasi. Plucker dan Makel (2021) menghadapkan kepada para kritikus tersebut banyak temuan pendidikan yang telah direplikasi dan digeneralisasi lintas konteks, termasuk hasil penyelidikan sosiokultural (Coalition for Psychology in Schools and Education, 2015).

Plucker dan Makel (2021) mengingatkan landasan epistemik dari pentingnya replikasi, yang berperan dalam pembangunan maupun evaluasi teori dengan mengutip Schmidt (2017, p. 236), "Satu pengamatan saja tidak dapat dipercaya. Replikasi mampu mengubah pengamatan menjadi fakta, atau sepotong pengetahuan."

Dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi, Efendic dan Van Zyl (2019), dengan mengutip Kepes and McDaniel (2013), menandakan bahwa Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) memiliki "masalah struktural" yang membawa pada kurangnya kredibilitas dan kepercayaan dari temuan-temuan di bidang ini. Hal ini mengarahkan Kepes dan McDaniel (2013) untuk menyimpulkan bahwa literatur penelitian PIO mungkin mengandung tingkat hasil positif palsu dan salah estimasi ukuran pengaruh (*effect size*).

Dalam catatan kakinya, disebutkan bahwa masalah-masalah struktural itu adalah (1) 97% artikel di jurnal PIO berniat menolak hipotesis nol; (2) 'struktur hadiah' (*reward structure*) jurnal lebih memberikan bobot pada hipotesis-hipotesis yang terdukung (*supported hypotheses*); (3) peneliti PIO memanipulasi data untuk menyesuaikan model dan mendukung klaim mereka; dan (4) dalam upaya untuk memvalidasi produk konsultasi seperti alat psikometri, atau intervensi, praktisi/konsultan PIO juga dapat memanipulasi data untuk menunjukkan bahwa produk mereka 'bekerja dengan baik'.

Lebih lanjut, Efendic dan Van Zyl (2019) menyampaikan bahwa struktur insentif yang ada saat ini, memang dapat meningkatkan "produktivitas", namun dapat mengarah pada terwujudnya "insentif yang menyimpang". Ketika penghargaan uang dikaitkan dengan luaran penelitian (*research output*), godaan untuk terlibat dalam pekerjaan yang 'ceroboh' namun mampu menghasilkan uang dengan cepat secara alami meningkat.

Peneliti mungkin lebih cenderung untuk mengambil jalan pintas untuk memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Jenis konteks ini bahkan dapat mengarah pada pelipatgandaan praktik penelitian yang dipertanyakan (*questionable research practices/QRP*) dan penurunan nilai dari hasil penelitian negatif (*negative results*) – karena hasil-hasil riset yang tidak sejalan dengan hipotesis kerja secara inheren cenderung tidak diprioritaskan untuk dipublikasikan oleh editor jurnal (padahal semestinya dihargai sama bobotnya dengan hasil riset yang mendukung hipotesis kerja).

Dalam kaitan problematika tersebut, Castille et al. (2022) mengusulkan agar para psikolog PIO menciptakan sebuah inisiatif sains terbuka untuk mengatasi persoalan sumber daya yang tidak memadai (*insufficient resources*) - yang diatribusikan sebagai penyebab terjadinya krisis reproduisibilitas, yaitu sebuah platform penelitian replikasi urun daya multi-situs (*crowdsourced multi-site replication research*)/PMUD.

Dalam konteks PIO, mekanisme PMUD akan membuat kebutuhan berbagai pihak terbuka dan dapat diakses. Pihak-pihak tersebut adalah praktisi, peneliti, akademisi, dan pihak yang terkena dampak pekerjaan PIO – seperti karyawan, manajer, dan organisasi tempat bekerja. Kontributor dapat diberikan akses terbuka ke setiap tahap proses penelitian, mulai dari menghasilkan ide dan solusi untuk masalah, hingga ide tersebut diperiksa secara terbuka melalui tinjauan sejawat, atau memiliki desain yang dikritik oleh pihak yang dilayani sehingga bermuara pada produk penelitian (misalnya, manuskrip yang diterbitkan) (Castille et al., 2022).

Serupa dengan bidang-bidang psikologi yang disebutkan sebelumnya, Psikologi Sosial juga dilanda oleh krisis reproduisibilitas, bahkan mungkin yang paling awal. Swiatkowski dan Dompnier (2017) menyimpulkan bahwa rendahnya reproduisibilitas dalam psikologi sosial sebagian disebabkan karena masalah berulang dari kekuatan statistik yang rendah (*low statistical power*), penggunaan praktik penelitian yang dipertanyakan, seperti praktik "HARKing" (*Hypothesizing after the results are known*/Berhipotesis justru setelah hasilnya diketahui) dan problem derajat kebebasan peneliti, yakni semua jenis fleksibilitas yang tidak dapat dibenarkan dalam analisis data, seperti bekerja dengan beberapa variabel dependen yang dirahasiakan, mengumpulkan lebih banyak observasi pasca pengujian hipotesis awal, menghentikan pengumpulan data lebih awal dari yang direncanakan karena temuan prediksi yang signifikan secara statistik, mengendalikan efek gender secara a posteriori, dan mengeliminasi kondisi-kondisi eksperimental yang "tidak efektif" agar hasil studinya signifikan secara statistik (Swiatkowski dan Dompnier, 2017).

Swiatkowski dan Dompnier (2017) juga menyoroti bahwa salah satu isu khas dalam krisis reproduisibilitas bidang Psikologi Sosial adalah adanya asumsi tersembunyi dari dependensi

konteks (*context-dependency*) dari efek psikologis sosial. Van Bavel et al. (2016) mendukung klaim tersebut dan menunjukkan bahwa perbedaan tingkat replikasi antara psikologi sosial dan psikologi kognitif (25% vs 53%) dalam Proyek Reprodusibilitas *Open Science Collaboration* (2015) dapat dikaitkan dengan kepekaan konteks yang lebih besar dalam Psikologi Sosial, dibandingkan dengan faktor metodologi lainnya (misalnya, ukuran efek, ukuran sampel yang kecil).

Kalau dalam psikologi pendidikan, perbedaan individual (*individual differences*) dijadikan argumen, dalam psikologi sosial perbedaan lintas budaya (*cross-cultural differences*) sering dijadikan bahan argumen untuk sikap skeptis terhadap krisis reprodusibilitas (bahwa krisis ini dibesar-besarkan). Kendati demikian, bagi sebagian ahli, argumen tersebut tidak berlaku karena peneliti psikologi sosial seharusnya berpeluang mengambil langkah untuk mengenali dan menyelidiki konteks gejala, atau "mengungkapkan asumsi tersembunyinya dan dengan demikian mengklarifikasi konteks-konteks di mana sebuah [teori] itu bekerja dan di mana teori itu tidak bekerja" (McGuire, 1983, p. 7), misalnya dengan mencari beberapa kemungkinan mediator dan moderator yang berpotensi berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, proposisi kedelapan dari orasi ini adalah bahwa ***Psikologi telah terkorupsi (corrupted). Gejala krisis reprodusibilitas menunjukkan bahwa Psikologi telah terkorupsi di dalam ekosistem sains yang sangat kompetitif untuk meraih publikasi (dan sebagai konsekuensinya: pengakuan serta publisitas yang bersifat egosentris), dan perlu bergandengan tangan dengan Sains Terbuka untuk mencegah lebih jauh peristiwa dan dampak selanjutnya dari korupsi ilmu. Oleh karena Psikologi mempelajari manusia, maka Psikologi yang terkorupsi juga merupakan cermin manusia yang terkorupsi.***

Ibu/Bapak, Hadirin yang saya hormati,

Sains Terbuka bukanlah unsur penyelamat krisis ilmu tanpa pertanggungjawaban. Sains Terbuka tidak dapat diterima begitu saja tanpa kritik. Dalam bidang Psikologi, misalnya, Bazzoli (2022) menyatakan bahwa asumsi-asumsi Sains Terbuka selama ini diandaikan begitu saja tanpa diperiksa. Pertama, ia menyatakan bahwa Sains Terbuka tidak kompatibel dengan epistemologi konstruksionis, yang riset-risetnya tidak berambisi menguji hipotesis, seperti riset-riset aksi dan etnografi. Justru tipe-tipe riset ini "tidak mencari objektivitas" juga tidak memerlukan replikabilitas dalam studi yang berlandaskan epistemologi ini. Bagi Bazzoli, memasukkan syarat-syarat Sains Terbuka dalam pendanaan *semua* riset maupun promosi jabatan akademik akan membuat pengucilan bagi sekelompok peneliti tertentu, dan menghambat karier serta reputasi seseorang.

Menariknya, Bazzoli sendiri mengakui bahwa Sains Terbuka dapat disempurnakan untuk dapat diaplikasikan pada jenis riset kualitatif (sebagai perbandingan, lihat juga Branney et al., 2023). Bazzoli berargumen bahwa prinsip transparansi dari Sains Terbuka tidak dapat diterapkan begitu saja secara universal khususnya pada riset-riset terhadap kelompok rentan dan terpinggir (misal, korban kekerasan, imigran yang tak berdokumen). Menurutnya, transparansi dapat diterapkan dengan cara mengungkap posisi peneliti sendiri dalam publikasi penelitian. Peneliti perlu merefleksikan bagaimana pertanyaan dan data penelitian dihasilkan dan bagaimana hasilnya ditafsirkan, serta bahwa proses ini tidak bebas nilai melainkan dibentuk oleh lingkungan dan keyakinan peneliti. Hasil refleksi ini perlu dipublikasikan bersama dengan artikel.

Hofmann (2022) menyebutkan sejumlah tantangan epistemik terhadap Sains Terbuka yakni *governance, framing, looping effects, proper data procurement, validation, replication, bias, and*

polarization. Ulasan bagian sebelumnya yang membahas krisis reproduibilitas, sudah disentuh sebagian besar tantangan ini, seperti *governance, validation, replication, dan bias*.

Dalam kaitannya dengan *looping effects*, Hofmann (2022) menyatakan bahwa sementara Sains Terbuka diharapkan untuk memacu asesmen dan metrik baru pengukur dampak sains, metrik alternatif dapat mengurangi konformitas orang terhadap sistem akreditasi yang tidak adil, namun tetap bisa juga jatuh pada persoalan yang sama.

Menghubungkan uang dengan metrik hanyalah salah satu cara (dan belum tentu cara terbaik) untuk mengakui pentingnya pengakuan dan penghargaan, namun hal itu dapat memperkuat struktur sosial ekonomi yang sedang timpang. Oleh karenanya, meningkatkan infrastruktur dan memfasilitasi kontribusi dan akses masyarakat kurang mampu terhadap sains sangatlah penting,

Gerakan Sains Terbuka dari bawah (*bottom up*) bukan hanya hendak meningkatkan keterbacaan (*readership*) pengetahuan yang ada di dunia, melainkan lebih radikal lagi, memajukan partisipasi komunikator dari Negara-negara Selatan dalam diskursus pengetahuan global.

Kendati demikian, yang terjadi lebih banyak sejauh ini adalah investasi Negara-negara Utara untuk menyebarkan pengetahuannya melalui berbagai jalur Akses Terbuka, sedangkan kelompok-kelompok sosial lainnya dari Negara-negara Selatan tetap terpinggirkan dalam kancah diskursus keilmuan. Testimoni mereka diragukan, dan pengalaman mereka tidak terepresentasikan dalam sumber daya hermeneutik dari kelompok mayoritas. Rumah-rumah penerbit (*publishing houses*) dari Negara-negara Utara malah memperoleh arena yang lebih luas lagi yang membuat dependensi Negara-negara Selatan. Padahal yang dibutuhkan adalah pembongkaran (dekonstruksi) hegemoni pengetahuan dari Utara untuk mencapai keadilan epistemik.

Serupa pendapat Piron (2017) yang sudah diulas sebelumnya, Knöchelmann (2021) cukup keras memperingatkan bahwa Akses Terbuka - bagian dari Sains Terbuka - yang tidak kritis justru memperkuat hegemoni pengetahuan Negara-negara Utara dalam komunikasi keilmuan, melestarikan retorika Negara-negara Utara mengenai "kualitas publikasi", "reputasi ilmiah", dan "pemeringkatan". Demokratisasi pengetahuan (*democratization of knowledge*) tidak terjadi.

Mengapa penting untuk mempersoalkan relasi Utara-Selatan (atau Barat-Timur) khususnya dalam konteks ilmu-ilmu sosial, seperti Psikologi? Simaklah ungkapan Magnis-Suseno (2015), sebagai berikut:

"Bidang saya filsafat. Saya seorang generalis. Artinya, saya merasa cukup menguasai sejarah dan metode-metode pemikiran filosofis, dan di dua tiga bidang saya mampu menulis monografi. Namun, majalah filsafat berstandar prima di Jerman (sama di AS) tidak akan memuat tulisan tingkat generalis. Filsafat internasional adalah *highly specialized*. Orang, misalnya, tidak menulis tentang 'filsafat moral Immanuel Kant', tetapi tentang 'fungsi *Zusatz* tentang *Faktum der Vernunft* dalam deduksi Kant tentang imperatif kategoris'. **Bagaimana mungkin kami yang jauh di Indonesia dan tidak terlibat dalam diskursus ekstrem spesialisik para filosof profesional di Eropa dan Amerika bisa menulis sesuatu yang mau diterima dalam jurnal-jurnal mereka?**

Lebih penting lagi, yang kita perlukan di Indonesia justru bukan spesialisisme ekstrem itu. Untuk mengembangkan filsafat akademik di Indonesia, kita justru memerlukan filosof generalis. Seorang filosof yang mampu mengantarkan para mahasiswa peminat filsafat ke dalam cara berpikir filosofis karena mempunyai wawasan yang menyangkut filsafat sebagai keseluruhan. Publikasi mereka harus generalistik! Mempersyaratkan publikasi di jurnal internasional tidak menaikkan mutu para akademisi kita, tetapi mencekiknya! ... Kiranya sudah waktunya Dikti, dalam rangka

revolusi mental, **melakukan konsultasi dengan dunia perguruan tinggi sendiri untuk mencari cara pembuktian prestasi ilmiah yang proporsional.**"

Pesan Magnis-Suseno kiranya jelas, bahwa sistem pembuktian prestasi ilmiah di Indonesia belum mempertimbangkan demokratisasi pengetahuan, melainkan bergantung pada jurnal-jurnal ilmiah dari Negara-negara Utara yang memiliki epistemologi yang berbeda dengan Negara-negara Selatan. Untuk Psikologi, dapat ditanyakan hal yang serupa: Apakah Masyarakat Indonesia memerlukan Psikologi dengan spesialisasi ekstrem, atau bagaimana? Ini adalah pertanyaan tentang kebutuhan kontekstual komunikasi keilmuan dan dapat menjadi bahan refleksi komunikasi sains psikologi.

Lebih lanjut, Knöchelmann (2021) menyayangkan bahwa perkembangan teknologi media baru belum dioptimasi oleh gerakan Akses Terbuka, padahal perkembangan ini dapat dimanfaatkan untuk merestrukturisasi kekuatan komunikasi keilmuan, meredistribusikannya kepada komunitas keilmuan. Knöchelmann mengusulkan dua unsur, yaitu (1) skala-kecil (*small scaling*) - inisiatif yang dimiliki oleh komunitas-komunitas kecil yang berkolaborasi, dan (2) dipimpin oleh ilmuwan (*scholar-led*) - yang lebih dekat dengan keragaman dan perjuangan ilmiah, sebagai alternatif dari infrastruktur penerbit komersial yang sudah stabil. Contoh platform semacam ini adalah *AmeliCA* atau *Redalyc* di Amerika Latin.

Lebih keras lagi, Sains Terbuka sempat dituduh sebagai pelanggeng neoliberalisme. Dalam hal ini, Sains Terbuka (sebagai bagian dari reformasi kebijakan sains) ditafsirkan sebagai menyerahkan proses sains kepada "pasar", bahkan menyebarkan ketidakpercayaan pada kemampuan ilmuwan untuk memahami data dan mengambil kesimpulan atasnya [sehingga dalam Gerakan data terbuka (*open data*), data penelitian harus diserahkan oleh ilmuwan kepada publik secara terbuka untuk dapat dibaca dan dinilai oleh siapapun, oleh ahli sampai dengan amatiran] (Uygun Tunç et al., 2021).

Sains Terbuka disinyalir bukan sedang menyelesaikan permasalahan metodologis riset yang mengganggu perkembangan teori, melainkan sedang mengadvokasi ideologi tertentu, yakni untuk meluaskan pasar neoliberal, dengan cara "mengiklankan model bisnis akademik baru" di tengah-tengah kejenuhan proses sains yang telah berlangsung berabad-abad.

Sinyalir ini berlandaskan sejumlah indikasi adanya koneksi antara reformasi sains dan ideologi tertentu, seperti yang terjadi pada dua praktik Sains Terbuka, yaitu Praregistrasi dan Model *Peer Review* Baru (Uygun Tunç et al., 2021).

Praregistrasi adalah mendaftarkan rencana penelitian (termasuk hipotesis-hipotesis riset) agar peneliti tidak seenaknya memutarbalikkan hipotesis [menjadi hipotesis semu] di "tengah jalan" penelitian demi menyesuaikan hipotesis dengan data hasil riset (dikenal sebagai *HARKing: hypothesizing after the results are known*). Penelitian tanpa praregistrasi dapat mempromosikan proses sains yang tak akurat (karena dengan demikian, hipotesis yang bisa diubah kemudian tidak pernah dapat difalsifikasi; sehingga komunitas riset tidak dapat menilai mana hipotesis yang salah dan benar) dan karenanya hasilnya akan sulit direplikasi maupun dapat diandalkan (Rubins, 2017).

Praregistrasi rencana riset memungkinkan orang lain untuk secara transparan menilai kapasitas sebuah pengujian untuk memfalsifikasi sebuah prediksi (Lakens, 2019). Ini adalah nilai metodologis pada satu sisi. Pada sisi yang lain, secara ideologis, dimunculkannya "label/sabuk praregistrasi, sabuk sains terbuka" (*open science badge*) dianggap telah mendangkalkan maksud asli praregistrasi jika publik tetap tidak memiliki akses terhadap isi dari praregistrasi (misalnya karena aksesnya sengaja diembargo), melainkan hanya dihadapkan pada *penampilan reputasi* sabuk penanda adanya praregistrasi.

Secara ideologis pula, model-model *peer review* baru menghadapi sejumlah tantangan, kalau bukan tuduhan. Di satu sisi, model *peer review* baru hendak meningkatkan kontrol kualitas dan deteksi galat (*error*). Namun di sisi lain, sebagai contoh sebuah model baru, pendekatan *peer-review* yang meminta para ilmuwan membuat kesepakatan dengan pakar independen untuk meninjau/me-review penelitian mereka sendiri (diistilahkan sebagai *red-team approach*) sering dikaitkan dengan kapitalisme *platform*.

Contoh lain, model model *peer-reviewed peer review* (di mana ulasan terbuka/*open peer review* dinilai kembali oleh ilmuwan lain pascapublikasi) sangat mirip dengan situs peringkat web yang berfungsi terutama untuk melindungi konsumen dengan memungkinkan mereka mengakses metrik "reputasi" yang bersifat *crowdsourced* [Pembandingnya adalah rating di GoFood atau Tokopedia].

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari "*peer-reviewed peer review*" adalah untuk melindungi "konsumen" pengetahuan ilmiah dengan memperkenalkan lapisan kendali kualitas lainnya. Walau demikian, model *peer review* baru ini tetap menjadi bagian dari rangkaian pekerjaan yang tak berbayar, artinya tetap belum menjawab kritik besar *invisible labor* yang bersifat eksploitatif yang terjadi dalam sistem peninjauan sejawat (*peer review*) (Teixeira da Silva & Al-Khatib, 2019).

Teixeira da Silva dan Al-Khatib (2019) lebih lanjut menunjukkan adanya dinamika logika kapitalistik dan upaya perlawanan terhadapnya. Perusahaan-perusahaan penerbit besar atas nama "sifat sains", "kebaikan komunitas" dan "menjaga objektivitas" menekan semaksimal mungkin insentif kepada penelaah/pengulas (*peer reviewer*), namun pada saat yang sama mereka mengeruk keuntungan finansial melalui sistem publikasi *closed access*, *subscription-based access*, dan yang sedang mengemuka - dengan wajah "seolah mendukung Sains Terbuka" - *gold open access* (mewajibkan penulis membayar jika ingin karyanya dapat diakses luas secara terbuka).

Bersamaan dengan logika kapitalistik yang juga dianut oleh perguruan tinggi yang mengutamakan peringkat (*ranking*) dan metrik-metrik simplistik yang dibawanya, sistem *peer review* yang bersifat tertutup dan buta (*closed and blind reviews*) pun balik dipermainkan oleh sejumlah kelompok untuk meraih "hadiah" (*rewards*) atas nama "produktivitas" (yang mana merupakan: produktivitas palsu). Muncullah kartel *reviewers*, yang terjadi juga pada penerbit kenamaan seperti "sekelas" Wiley (RetractionWatch.com, 2022).

Jelasnya, Teixeira da Silva & Al-Khatib (2019, p. 2) menyampaikan:

"It is also known that within this corrupted and gamed system, publishers have been fooled by a pool of dishonest academics and others, with fake peer reviews, fake peer reviewers and fake authorship, fraudulent forms of academic publishing that are abounding in dishonesty"

Melalui makalah *Kebebasan Akademik: Melanjutkan Gagasan Psikologi Perguruan Tinggi*, J. Abraham (2018) menyarankan agar sistem promosi karier dosen dan peneliti mencatat *peer review* sebagai tindakan kewargaan (*citizenship behavior*) sekaligus diapresiasi sebagai kontribusi intelektual sebagaimana seseorang menulis sebuah artikel yang memiliki kontribusi asli (*original contribution*). Kita seharusnya menghargai apa yang harus dihargai. Bukan sebaliknya, tidak menghargai apa yang seharusnya dihargai, atau menghargai apa yang seharusnya tidak dihargai.

Berdasarkan hal-hal di atas, proposisi kesembilan dari orasi ini adalah bahwa **Sains Terbuka yang berpotensi melawan korupsi ilmu (lihat proposisi kedelapan) memiliki banyak wajah (di antaranya wajah neoliberal, neokolonial, dengan segala eksesnya), sehingga perlu landasan yang tepat bagi trajektorinya untuk konteks Indonesia.**

Tuduhan terhadap adanya ideologi tersembunyi di balik sains terbuka dijawab sebagai berikut: hubungan antara metodologi dan ideologi (dimensi aksiologi) dalam sebuah kebijakan sains (*science policy*) tidaklah selangsung itu melainkan lebih kompleks (Uygun Tunç et al., 2021).

Hal ini bukanlah persoalan insularitas akademik (menutup mata bahwa ada ideologi tertentu di balik reformasi sains), karena sekalipun benar ada ideologi tersebut, nyatanya sains terbuka dikenal/terbukti meningkatkan kualitas proses sains.

Ambil tiga contoh entitas sains terbuka yang “tidak seneoliberal” itu (dan menjadi bagian dari trajektori melawan korupsi ilmu) (Uygun Tunç et al., 2021), yakni (1) Sains Tim, (2) Berbagi data terbuka, dan (3) Epistemologi indijenus.

Praktik Sains Tim (Team Science, istilah serupa: Citizen Science)

Praktik ini merupakan koordinasi dan kooperasi berskala besar dari pikiran, perspektif teoretis dan metodologis, serta sumber daya dari para ilmuwan, yang dapat menyelesaikan krisis replikasi, dengan bersama-sama melakukan “*multisite replication studies*”. Dengan kata lain, *team science* meningkatkan kekokohan dan reliabilitas ilmu.

Masalah-masalah penelitian yang bersifat sangat kompleks *tidak* mungkin dijawab dengan kultur sains neoliberal yang lebih menghargai publikasi sebagai penulis pertama, hipotesis-hipotesis yang harus orisinal (harus belum ada yang memikirkannya), dan hasil-hasil yang cepat (individualistik, kompetitif).

Melainkan, yang dibutuhkan adalah proses kolektif, tanggung jawab kolektif, dan kepemilikan kolektif (kolaboratif), dengan perkataan lain: **kualitas sosial dari seorang ilmuwan** seperti bekerja dalam sains tim, yang tidak langsung berhubungan dengan luaran atau metrik (jumlah publikasi, H-Index, Faktor Dampak/Impact Factor, dan sebagainya).

Praktik Berbagi Data Terbuka (Open Data Sharing)

Berbagi data terbuka, dengan prinsip FAIR (*findable, accessible, interoperable, dan reusable*) sejalan dengan norma R. Merton (sebagaimana dikutip dalam Anderson et al., 2010) tentang *communality* (kepemilikan kolektif dari produk ilmiah) dan *organized skepticism* (penelaahan kritis terhadap klaim ilmiah berdasarkan metodologi dan kode etik keilmuan).

Kedua norma tersebut jelas kontras dengan "norma neoliberal" yang menekankan publisitas walau dengan cara-cara yang merisikokan integritas, seperti pemotongan data (*data trimming*) yang sewenang-wenang, *cherry picking* (memilih hasil penelitian yang dianggap potensial untuk dihargai pasar - sehingga *negative results* dihindari untuk dilaporkan), sampai dengan fabrikasi data (ingat kasus Diederik Stapel; Verfaellie & McGwin, 2011).

Epistemologi Indijenus

Ketika psikologi dilanda oleh krisis reproduisibilitas, sejumlah metode riset psikologi modern yang dianggap stabil (seperti eksperimen) dikritik habis-habisan. Sains Terbuka membawa horison atau framework bagi beroperasinya *indigenous epistemology* (Hunter, 2021). Sebagai contoh, *indigenous epistemology* dari Abraham Maslow mendorong aktualisasi penuh dari "sikap empiris" - "*looking at things for yourself rather than trusting to the a priori or the authority of any kind*" (Maslow, 1966, p. 135).

Uniknya, Maslow menyatakan bahwa perlu ada integrasi dikotomi antara: "*mechanistic and humanistic science, safety science and growth science, spectator knowledge and experiential*

knowledge, simpleward and comprehensive science, abstractness and suchness meaning, controlling science and Taoistic science, desacralized and sacralized science, means-centering and problem-centering" (p. xv).

Secara fundamental, Maslow memandang sains sebagai produk dari kegiatan manusia, dan untuk itu ia mendorong "humanisasi" sains yang terlanjur rigid dan behavioristik. "*Psychological health of self-actualized individuals wasn't only morally good, but a requisite for scientific creativity*" (Flis, 2019). Kaum neoliberal justru menganggap upaya Maslow menghumanisasi sains sebagai regresi (kemunduran) dan intimidasi (ancaman).

Bukti-bukti bahwa Sains Terbuka tidaklah seneoliberal itu tentunya tidak cukup sebagai landasan Sains Terbuka melawan korupsi ilmu. Guna menysasar 'melawan korupsi ilmu', Sains Terbuka memerlukan Trajektori.

Ketika hendak dilahirkan, Sains Terbuka Indonesia terombang-ambing juga dengan diskursus global, seperti ulasan tentang tuduhan bahwa Sains Terbuka itu neoliberal. Faktanya, Sains Terbuka memang tidak monolitik, faktanya.

Sebagai contoh, ada istilah Sains Terbuka semu (*pseudo Open Science*). Misalnya, ada praktik praregistrasi [telah diulas sebelumnya] yang ditutup (diembargo) aksesnya dari publik untuk sekian lama. Melakukan praregistrasi bagi sebagian pihak sudah melakukan praktik Sains Terbuka, walau akses terhadap isinya ditutup. Bagi Lakens (2017), tindakan itu ironis; "Menyembunyikan pra-registrasi dari pembaca adalah kebalikan dari sains terbuka, sebenarnya saya berpendapat bahwa itu adalah sains terbuka semu" ("*Hiding pre-registration from the reader is the exact opposite of open science, in fact I would argue that it is pseudo open science*"). Dominik et al. (2021) menunjuk gejala Sains Terbuka palsu lainnya, walau mereka tidak menggunakan istilah ini, melainkan "*Sains Terbuka yang tidak akan berhasil*":

"Membalik *paywall* [dinding berbayar akses artikel jurnal] bukanlah solusi untuk komunikasi ilmiah dalam ekosistem Sains Terbuka global. Model '*penulis membayar biayanya*' untuk menyebarkan hasil penelitian tidaklah layak dalam praktik dan tidak masuk akal. Menyadari bahwa dokumen ilmiah (*records of science*) adalah sumber daya yang membentuk bagian dari warisan budaya bersama umat manusia, menjadi jelas bahwa model Sains Terbuka ... [ini] ... tidak akan berhasil" (p. 3).

Becerril-Garcia (2023) menyatakan lawan dari Sains Terbuka palsu (yang telah mengkomodifikasikan sains, atau menjadikan sains sebagai komoditas - dan bukan barang publik - atas nama keterbukaan; yang telah mengkomersialkan keterbukaan) adalah **Sains Terbuka sejati (*true open science*)**, yakni yang berprinsip, "*Everyone has the same opportunity to be part (publish and read)*". Kesempatan untuk mempublikasikan dan membaca bukan hanya untuk mereka yang "kuat membayar".

Oleh karena itu, urgen adanya basis etis (*ethical basis*) dari trajektori untuk Sains Terbuka di Indonesia yang tak tergoyahkan, dan orasi ini menyatakan Pancasila dan Agama adalah basis trajektori sains terbuka. Pernyataan ini sekaligus menjawab panggilan yang dinyatakan oleh penulis mengenai urgensi "***Call for Values***" bagi Sains Terbuka Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Becerril-Garcia, 2019; lihat Gambar 1).



Gambar 1. Panggilan bagi Nilai-nilai Sains Terbuka [dikemukakan oleh Juneman Abraham dalam event Global Minds di Universitas Leuven, Belgia, 2019, <https://www.arts.kuleuven.be/english/intercult>]

Pada ulasan di depan, sudah dikemukakan, mengapa agama (spiritualitas, moralitas) layak sebagai penyempurna epistemologi korupsi, dan karenanya layak juga sebagai landasan trajektori Sains Terbuka Indonesia dalam melawan korupsi ilmu. Pada ulasan berikut, akan dikemukakan, mengapa Pancasila pun layak sebagai *dasar dari trajektori itu*. Berikut ini adalah sari-sari pemikiran Driyarkara tentang Pancasila (sebagaimana dikutip dalam Promesso, 2013; Sudiarja et al., 2006; Widyarsono, 2023) yang relevan dengan gerakan Sains Terbuka [*cetak miring oleh penulis*]:

"Pancasila menunjuk manusia sebagai 'bakat', potensi, dorongan ke Tuhan. Agama merupakan 'karunia' Tuhan; karunia diterima karena dalam diri manusia sudah ada bakat ... Manusia merupakan person me-Negara, artinya ada aktivitas bersama (ada dialog dan kekritisn, komunikasi, sosialitas, ke-saling-an) yang dasarnya adalah prinsip dan orientasi bersama (di Indonesia: Pancasila) [*Bagaimana memandang kelima sila?*] Perikemanusiaan (realitas dasar manusia, ada-bersama-dengan-cinta kasih) - Keadilan Sosial (menyediakan prasyarat kehidupan dalam kebersamaan) - Demokrasi (kooperasi membentuk kesatuan-karya) - Kebangsaan (kesatuan yang besar, tempat pertama melaksanakan perikemanusiaan) - Ketuhanan (sumber/dasar perikemanusiaan) Perikemanusiaan itu harus dijalani dalam bersama-sama menciptakan, memiliki, dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup. Penjelmaan Perikemanusiaan dalam sektor ini disebut Keadilan Sosial. Negara ada karena dan selama manusia beraktivitas bersama. Hasil dari me-Negara: menguntungkan, mengembangkan masing-masing persona dari anggota negara Persona hanya bisa mewujudkan diri [*ingat Abraham Maslow*] melalui kebersamaan dengan yang lain. Karya me-Negara (membangun Negara Indonesia) dengan prinsip ekasila, yakni

gotong royong. Tujuan me-Negara adalah mengupayakan keadilan sosial; kemakmuran umum/bersama sebagai tujuan langsung (*bonum commune*).”

Agar tidak gamang sebagai dasar trajektori melawan korupsi ilmu, Sains Terbuka harus berlandaskan pada nilai-nilai (dalam konteks Indonesia, yang disepakati sebagai kontrak sosial: Pancasila) (Irawan et al., 2020) dan konstitusi (karena memuat tujuan me-Negara). Adapun tujuan negara berdasarkan Mukadimah UUD 1945 adalah (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada taraf psikologis, Pancasila paralel dengan “kontrak psikologis” manusia Indonesia (Juneman et al., 2012). Gerakan Sains Terbuka, seperti Deklarasi San Francisco tentang Penilaian Penelitian (2020) dan Leiden Manifesto (Hicks et al. 2015) ditemukan mempromosikan nilai-nilai Keadilan (*equity*) dan Kemanusiaan (*humanity*) (DORA, 2020), Demokrasi (Briggles et al., 2015), Ketuhanan (Arfan et al., 2018).

Untuk meningkatkan partisipasi dalam penelitian oleh kelompok yang kurang terwakili dan tertindas, DORA berusaha mengatasi ketidaksetaraan global dan pribadi dalam pembuatan penelitian dan evaluasinya. Hal ini sejalan dengan nilai **keadilan sosial**.

DORA setuju bahwa akademisi harus diakui atas upaya yang meningkatkan transparansi, seperti berbagi data. Hal ini sejalan dengan nilai **persatuan**. Uiterwaal et al. (2021, p. 102) menunjukkan bahwa berbagi data (*data sharing*) adalah mendukung nilai-nilai persatuan dalam keragaman (*unity in diversity*) - khususnya di era dewasa ini yang nyaris tanpa sekat dan yang semakin mengandalkan data besar (*big data*) untuk menyelesaikan masalah-masalah **kemanusiaan**; sedangkan eksklusivitas data menghambatnya:

“Tidak peduli apakah seorang sarjana mempelajari bahasa Franken, peninggalan arkeologi Anglo-Saxon kuno atau fotografi Perang Dunia I; untuk dapat berhasil mengatasi pertanyaan penelitian yang melampaui batas-batas nasional atau disiplin, kita harus dapat menggabungkan sumber-sumber pengetahuan yang berlokasi di berbagai negara Baru-baru ini, fenomena tipe data dan format file yang bersifat *proprietary* (kepemilikan privat) merupakan batasan teknis tambahan terhadap ketersediaan informasi.”

Dengan meningkatkan keterverifikasian dokumen ilmiah, misalnya dengan *open data* (data terbuka) dan *open methods/protocols* (metode/protokol terbuka), hal ini meningkatkan reproduibilitas dan kualitas penelitian, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Hal ini sejalan dengan nilai **kemanusiaan**. Kepercayaan publik terhadap ilmu yang berkualitas yang dihasilkan oleh penerapan prinsip Sains Terbuka akan meningkatkan kemanusiaan. Sebaliknya, (ilmu-ilmu) kemanusiaan (*humanities*) akan meningkatkan kepercayaan publik, karena prinsipnya sains adalah sebuah hal yang *manusiawi* (Couée, 2020, p. 1):

“Semua penelitian dipenuhi dengan pemikiran, kecerdasan, dan kreativitas manusia, bersama dengan pengetahuan sebelumnya, pandangan dunia, nilai, dan preferensi. Sebaliknya, sains tidak bisa ‘semata-mata’ objektif mengingat sains adalah proses otak yang dipengaruhi oleh ingatan, pandangan, nilai, dan sebagainya.

Penyangkalan total terhadap pengaruh pandangan dunia (*worldviews*) terhadap sains bahkan mungkin mencerminkan bias itu sendiri yang terkait dengan konteks budaya yang seragam. Analisis komparatif teks dan gagasan, baik secara sinkronis (pada titik waktu tertentu) dan diakronis (sepanjang jalur waktu), yang merupakan ciri khas filsafat dan

humaniora, dapat memberikan analisis independen tentang interaksi antara objektivitas/subjektivitas dan interpretasi/ideologi dalam penelitian ilmiah.”

Alih-alih hanya mengandalkan jurnal ilmiah dan prestisianya, DORA mempromosikan keilmuwanan terbuka (*open scholarship*), yang memungkinkan akses langsung dan universal ke karya ilmiah melalui berbagai *platform*. Hal ini mendorong evaluasi setiap karya berdasarkan kelayakannya.

Hal itu sejalan dengan nilai **demokrasi**. Briggie et al. (2015, p. 3) menandakan aplikasi prinsip Sains Terbuka, yaitu “Libatkan audiens Anda dalam membingkai masalah dan desain penelitian” (“*Involve your audience in the framing of the problem and the design of the research*”). Di samping itu, keilmuwanan terbuka menghargai secara inklusif seluruh spektrum hasil penelitian, seperti halnya DORA (bukan hanya *paper*, tetapi juga data, kode, protokol, reagen, dan pelatihan keterampilan).

Pertimbangkan juga substansi ungkapan Burgess-Jackson (2020) ketika ia menggugat rasa keadilan semua ilmuwan yang membiarkan terjadinya eksploitasi manusia dan ketimpangan sosial - bahkan menikmati itu dengan terus bermain dalam sistem yang eksploitatif dan timpang - dalam dunia publikasi ilmiah [cetak tebal oleh penulis]:

“Saya mengatakan semua ini bukan untuk menyombongkan diri (jelasnya), tetapi untuk mencegah ada dari pembaca yang mengajukan sanggahan atau keberatan, sebagai berikut: bahwa saya menerbitkan artikel di jurnal ‘predator’ karena saya tidak mampu mempublikasikan artikel di jurnal ‘terkemuka/bereputasi tinggi’. ... Rekam jejak saya sebagai penulis yang menerbitkan di jurnal terkemuka/terdepan di bidangnya menunjukkan bahwa **saya dapat terus bermain (*playing the game*)** selama saya terus menulis. Kendati demikian, saya percaya bahwa melakukan hal tersebut adalah tidak bermoral (*immoral*).

Saya dulu berpikir bahwa editor dan penerbit telah membantu saya (*doing me a favor*) dengan menerbitkan karya ilmiah saya. Saya sekarang percaya bahwa saya lah yang membantu mereka (*doing them a favor*). Mengapa demikian? Saya membantu mereka dengan cara menciptakan karya ilmiah yang mendatangkan keuntungan yang besar buat mereka. Dengan menulis karya-karya itu, betapapun, saya pada hakikatnya melakukan pekerjaan (*I do the labor*); saya menaruh hati dan jiwa saya ke dalam semua hal yang saya tuliskan.

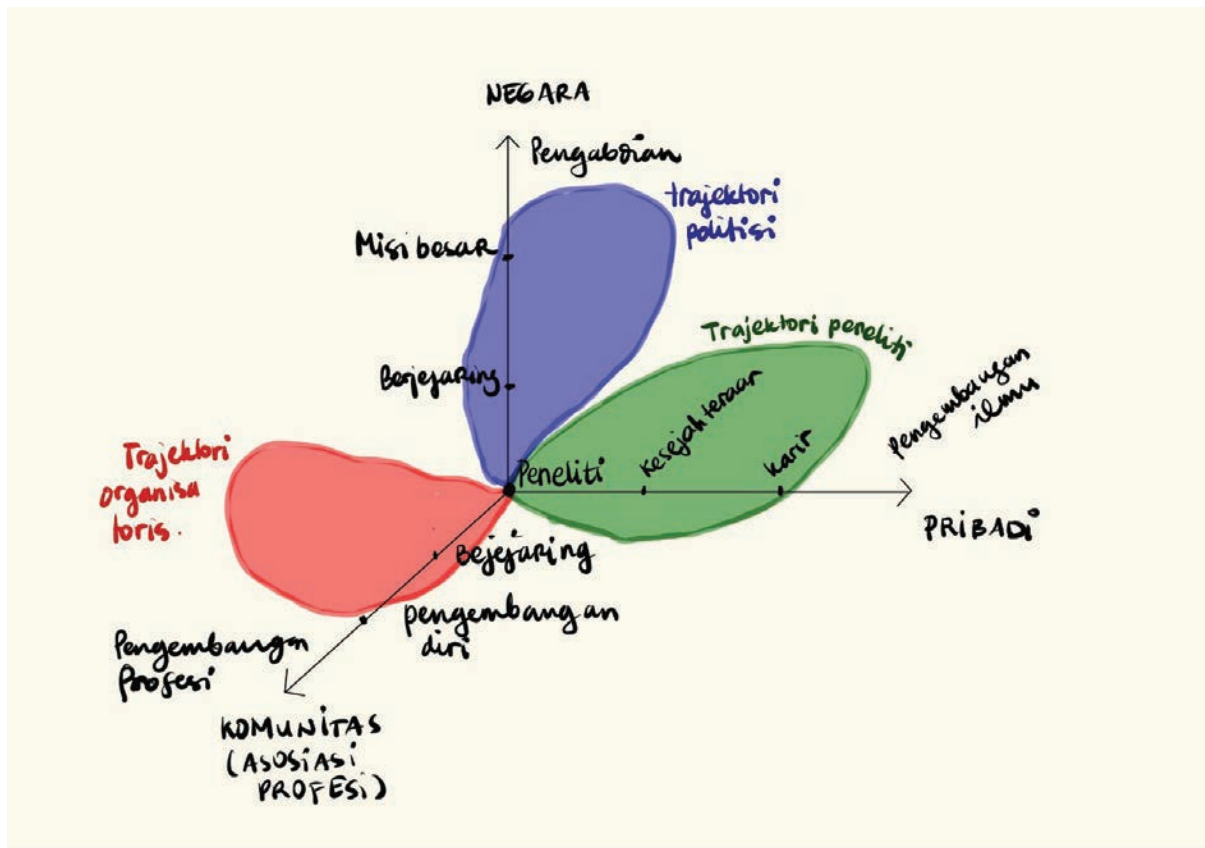
Mengapa harus pihak lain, terutama pihak-pihak penerbitan yang sudah kaya secara fantastis (*fantastically wealthy*), mendapatkan keuntungan dari itu? Kita tidak harus menjadi seorang Marxis untuk memahami maksud kalimat saya. Seseorang hanya perlu memiliki **rasa keadilan (*sense of justice*)** untuk dapat mengerti akan hal tersebut.”

Oleh karenanya, seluruh praktik sains di Indonesia dapat - bahkan wajib - diukurkan kepada Pancasila dan Konstitusi. Pertanyaannya; Bagaimana situasi parameter praktik sains di Indonesia? Saat ini tampak belum substantif, oleh karena penilaian kinerja penelitian tampak masih kental dengan kriteria-kriteria administratif (terbukti dari pengutamaan ukuran metrik publikasi, seperti peringkat jurnal dalam bentuk *quartile*, *SJR*, dan *impact factor*).

Situasi *exploitative labor* dan *capital flight* yang disebut oleh Burgess-Jackson (2020) terjadi dalam dunia publikasi ilmiah sesungguhnya bertentangan dengan tujuan konstitusional negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, orasi ini berposisi bahwa yang administratif harus selalu dimuati dengan yang substantif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip sains terbuka.

Proposisi kesepuluh dari orasi ini adalah bahwa **Sains Terbuka Indonesia membutuhkan landasan yang tak tergoyahkan di Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, bagi trajektorinya melawan korupsi ilmu.**

Ibu/Bapak, Hadirin yang saya berbahagia,



Gambar 2. Trajektori Sains Terbuka Indonesia

Sains Terbuka memuat nilai-nilai (*values*), yang meliputi integritas, replikabilitas/reproduksibilitas, dan diseminasi, berbasiskan Pancasila, Agama, dan Konstitusi. Orasi ini menawarkan sebuah trajektori Sains Terbuka Indonesia yang terdiri atas tiga buah sumbu, yakni sumbu pribadi (trajektori personal), sumbu komunitas (trajektori organisasional), dan sumbu negara (trajektori nasional). Nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan pada setiap sumbu ini dan kombinasi antar sumbu. Berawal dari nilai-nilai pribadi yang kemudian dikembangkan ke arah organisasi (melalui asosiasi profesi) atau ke arah negara secara politik.

Kata ‘Trajektori’ (*trajectory*) sering digunakan secara kiasan untuk menggambarkan proses perubahan atau perkembangan yang mengarah pada hasil tertentu (The Britannica Dictionary, 2023). Di tengah situasi merajalelanya korupsi ilmu, urgensi eksistensi trajektori Sains Terbuka untuk melawan korupsi itu tentunya sangat tinggi. Masalahnya, trajektori semacam itu di Indonesia belum ada.

Sejauh ini, yang ada adalah strategi Sains Terbuka dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (Dalimunthe et al., n.d.). Orasi ini berpandangan bahwa strategi Sains Terbuka tersebut dapat diintergrasikan dalam kerangka **Trajektori Sains Terbuka Indonesia** (Gambar 2).

Pada Sumbu Pribadi (Trajektori Personal Peneliti)

Pada 2017, saya pernah berujar (Abraham, 2017),

"Saya bertanya, 'apakah peneliti memang tak boleh sehat dan sejahtera (*healthy and wealthy*)?' Lalu, saya tambahkan, 'Apakah dia kehilangan haknya yang dijamin oleh konstitusi?' Bukankah Mukadimah Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 'memajukan kesejahteraan umum' adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia? Sementara itu, kesejahteraan umum dapat tercapai tidak terlepas dari kesejahteraan yang dipersepsikan oleh individu-individunya, termasuk individu peneliti."

Trajektori terdekat Sains Terbuka adalah memfasilitasi **kesehatan dan kesejahteraan** pribadi peneliti. Hal ini berdasarkan orientasi Sains Terbuka yang mempromosikan kemanusiaan, persatuan dalam keragaman, keadilan, dan demokrasi, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sains terbuka, dengan praktik-praktik seperti data terbuka, material dan protokol terbuka, replikasi, dan pra-registrasi, meningkatkan hasil-hasil penelitian psikologis yang bersifat kredibel dan berkelanjutan (*sustainable*).

Dengan advokasi sains terbuka terhadap diseminasi luas dan terbuka, maka tujuan penelitian diabdikan kepada generasi sekarang dan masa depan; hal ini sekaligus menjawab pertanyaan kritis, "*Sains itu untuk siapa?*" (Grahe et al., 2020) dan sejalan dengan konsep generativitas (*generativity*) dari Erikson (sebagaimana dikutip dalam Slater, 2003); di samping diri peneliti sadar dan merasa puas bahwa melalui Sains Terbuka, ia dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan orang lain, termasuk peneliti lain dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, masih pada sumbu ini, trajektori berikutnya adalah **karier** dosen dan peneliti. Sekarang adalah waktu yang tepat di Indonesia untuk melembagakan penilaian kinerja riset berdasarkan Sains Terbuka dalam karier peneliti.

Kesehatan dan kesejahteraan subjektif dosen dan peneliti akibat generativitas yang dibawa oleh Sains Terbuka seyogianya memiliki konsekuensi terhadap karier mereka. Oleh karena itu, penggunaan ukuran-ukuran yang bertanggung jawab dalam menyimpulkan kualitas penelitian (*responsible metrics*) yang berdampak terhadap jabatan (*tenure*) seorang dosen/peneliti sangat direkomendasikan, ketimbang mengandalkan semata-mata metrik simplistik-kuantitatif seperti faktor dampak/*impact factor* jurnal (O'Carroll et al., 2017). Sebuah publikasi hasil penelitian ilmiah *tidak* boleh serta-merta dinilai sebagai *berkualitas* hanya berdasarkan tempat/jurnal di mana hasil itu dipublikasikan. Peneliti tidak boleh diperingkat, lebih-lebih dalam kontinum satu dimensi (seperti berdasarkan H-index), melainkan diapresiasi secara multijalur.

Dalam trajektori karier ini, asesmen kualitatif terhadap karya peneliti adalah yang utama; evaluasi kuantitatif justru sekunder, bahkan tersier. Fenomena perjokian karya ilmiah (*contract cheating*) (sebagaimana diberitakan *Kompas*, 10, 11, 12 Februari 2023) pada satu segi dapat diatribusikan faktornya pada apresiasi yang bersifat monolitik terhadap karier dosen dan peneliti.

Oleh karena itu berbagai kebijakan (misalnya kebijakan kenaikan jabatan akademik, kebijakan pemberian pendanaan atau grant penelitian, kebijakan rekrutmen dan promosi jabatan fungsional) yang bersifat seduktif dan memberikan insentif terhadap ukuran-ukuran kuantitatif

seederhana (SJR, H-Index, dan sejenisnya) harus ditinjau ulang dan dimuati dengan porsi asesmen kualitatif yang lebih besar serta adil berdasarkan isi proposal, proses, maupun hasil penelitian.

Penyalahgunaan terhadap metrik-metrik kuantitatif sederhana oleh sebuah lembaga harus disebut sebagai tindakan institusional kurang etis yang perlu dikoreksi. Terminologi dan substansi Karier Sains Terbuka (*Open Science Career*) yang tidak sebatas pencitraan harus digalakkan.

Sebuah inisiatif bernama ***Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)*** (O'Carrol et al., 2017; Figure 1) harus mulai diadopsi sebagai kebijakan, disosialisasikan, dan diterapkan pada lembaga pendidikan. Matriks ini memuat enam jenis kegiatan Sains Terbuka dari dosen/peneliti, yakni (1) Proses riset, (2) Luaran/*output* riset, (3) Dampak/*impact* riset, (4) Pelayanan dan kepemimpinan, (5) Pengajaran dan supervisi, serta (5) Pengalaman profesional. Setiap jenis kegiatan ini diturunkan dalam berbagai sub-kegiatan yang memiliki kriteria evaluasi. Sejumlah hal dalam matriks ini sudah banyak dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Pada bagian trajektori Sains Terbuka sumbu pribadi ini, perlu disorot bahwa komunikasi sains, seperti berbagi hasil penelitian melalui jalur diseminasi non-akademik, serta menerjemahkan penelitian ke dalam bahasa yang sesuai untuk pemahaman publik, merupakan tindakan peneliti yang berbobot tinggi dalam karier Sains Terbuka.

Di samping itu, berkontribusi terhadap proses peninjauan sejawat yang bersifat terbuka (*open peer review*) - bukannya tertutup lagi buta (*closed and blind review*) - serta memiliki manajemen risiko keterbukaan, juga layak dijadikan kriteria penilaian kinerja dosen/peneliti.

Berkaitan dengan properti intelektual (lisensi, paten), yang perlu diboboti justru adalah kepiawaian seseorang dalam memeriksa isu legal dan etis dalam mentransfer properti intelektual secara ekonomis. Dalam dokumennya, ALLEA (2022) tegas menyatakan, "Penggunaan aktivitas paten-mematen sebagai metrik dalam evaluasi penelitian harus ditinggalkan. Hal tersebut terlalu heterogen, terlalu mudah dimainkan, dan gagal menangkap nilai penelitian kolaboratif yang mendasar" ("*The use of patenting activity as a metric in research evaluation is to be deprecated. It is too heterogeneous, too easily gamed, and fails to capture the value of fundamental collaborative research*").

De la Cueva dan Méndez (2022) menyatakan bahwa prinsip "seterbuka mungkin dan setertutup seperlunya" ("*as open as possible as close as necessary*") perlu menjadi pedoman beraktivitas dalam ketegangan antara "Properti Intelektual vs. Sains Terbuka". Secara lebih konkret, mereka menandakan bahwa ilmu dasar (*basic science*) hendaknya tidak dievaluasi berdasarkan indikator hak kepemilikan intelektual, melainkan wajib dibiarkan sebagai karya intelektual bebas (*free intellectual works*).

Hal ini karena ilmu dasar sejatinya memerlukan **pengembangan ilmu** berupa kritik dan komentar (dan hal itu akan diuntungkan dengan kegiatan Sains Terbuka) serta membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (*small and medium-sized enterprises*) untuk membangun komponen-komponen bebas dari ilmu dasar itu untuk usahanya dan mendayagunakan hasilnya. Dalam perspektif ini, ***ilmu justru dikorupsi apabila sains dasar dipatenkan.***

Rekomendasi di atas adalah bagi penghasil sains; sedangkan sebagai pengguna sains, tentu saja penggunaan data harus secara legal dan beretika merujuk pada syarat dan ketentuan dari masing-masing *dataset*.

Pada Sumbu Komunitas (Trajektori Organisasional)

Sehubungan dengan era sains tim (*team science*) atau sains warga (*citizen science*), Fecher dan Friesike (2014) mempertanyakan, "*Can anyone be a scientist?*" (p. 19). Ada kekhawatiran bahwa partisipasi publik secara "keroyokan" dalam membentuk sains hanya akan menghasilkan "sains" yang bermutu rendah. Kendati demikian, kekhawatiran ini ditepis berdasarkan fakta yang diamati oleh mereka bahwa umumnya sains warga tetap dipimpin oleh ilmuwan.

Dalam hal ini, trajektori Sains Terbuka yang terdekat pada sumbu komunitas adalah **berjejaring (*networking*)**. Dewasa ini, berjejaring semakin difasilitasi oleh teknologi komunikasi dan media sosial. Melalui media sosial, warga dan ilmuwan dapat saling berkoordinasi untuk menentukan agenda riset. Partisipasi warga dalam hal ini bersifat sukarela. Warga dalam hal ini dapat merupakan sesama ilmuwan maupun masyarakat umum/awam/amatir.

Meskipun demikian, terdapat kritik terhadap Sains Warga, yakni bahwa warga tidak selalu meningkatkan kapasitasnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seringkali warga hanya menjadi "pekerja bebas" (*free workforce*) (Fecher & Friesike, 2014), misalnya sebagai pengumpul data. Hal ini ditandaskan oleh Powell dan Colin (2009, p. 327), sebagai berikut:

"Sebagian besar latihan partisipatif (dalam Sains Warga) tidak melibatkan warga di luar acara tertentu atau beberapa minggu/bulan saja, dan keterampilan partisipatif warga tidak terbangun, sehingga mereka tidak terbantu untuk terlibat dengan ilmuwan atau pembuat kebijakan secara mandiri."

Oleh karena itu, trajektori berikutnya dalam sumbu komunitas ini adalah **pengembangan diri**. Maksudnya adalah, agar setiap partisipan dalam sains komunitas/sains warga terlibat aktif tidak hanya sebagai "pekerja lepas" melainkan juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dengan sifat-sifat keilmuwanan, yang akan membantu mereka bukan hanya untuk (1) menginisiasi proyek penyelidikan mereka sendiri secara independen dan transparan, melainkan juga (2) mampu memanfaatkan sifat-sifat keilmuwanan (*scholarship*) dan keterbukaan (*openness*) itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk mempengaruhi pembuat kebijakan di sekitar mereka untuk memperbaiki nasib kesejahteraan mereka.

Kualitas keilmuwanan dimaksud bukan hanya atau bukan pertama-tama kualitas metodologis penelitian, melainkan (1) memupuk inovasi dan pembelajaran yang lincah, (2) mampu berpikir di luar paradigma yang ada/konvensional, (3) menciptakan kesederhanaan dari kompleksitas, dan (4) berpartisipasi dalam pembelajaran bersama secara berkelanjutan (Hesse, 2018).

Lebih lanjut, bagaimana lebih meningkatkan lagi mutu kolaborasi antara ilmuwan profesional dan warga yang sudah terkembangkan kapasitas dirinya? Tidak lain adalah pembentukan model-model organisasional yang di dalamnya mencakup kedua unsur tersebut. Model-model organisasional ini merupakan jembatan antara **asosiasi profesi (yang keluar dari "menara gading"-nya)** dan kelompok warga yang berminat terhadap pengembangan ilmu, bersama menjadi penjaga sains (*science sentinel*) agar sains tidak (lagi) dikorupsi.

Pada Sumbu Negara (Trajektori Nasional)

Pada ulasan sebelumnya, telah disampaikan bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi hendaknya menjadi basis bagi Sains Terbuka Indonesia. Guna menghasilkan perubahan sosial untuk mencapai tujuan negara dimaksud, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa, harus disadari bahwa struktur kebijakan nasional perlu mendukung penemuan akademik (*academic discovery*). Oleh karenanya, kebijakan publik harus menghindar bahkan

melawan “model yang berpusat pada privatisasi dalam kapitalisme akademik (*academic capitalism*)” (Smart et al., 2019, p. 289).

Pada era "pascanormal" - di mana (1) fakta bersifat tak pasti, (2) terdapat nilai dalam perdebatan/disputasi, (3) adanya pertarungan tinggi, dan (4) seringnya keputusan-keputusan dibutuhkan secara urgen/mendesak - demokratisasi pengetahuan semakin mendesak.

Dalam rangka demokratisasi pengetahuan, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mendukung aktivitas **berjejaring** secara berkelanjutan antara aktor-aktor yang terlibat dalam dunia sains dan unsur-unsur publik (*Quadruple Helix*: Pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan aktor lainnya), juga secara adaptif melalui mediasi teknologi jejaring. Di samping itu, kebijakan Pemerintah yang mendukung sains sebagai barang publik, seperti penggunaan lisensi terbuka (*open license, Creative Commons*), perlu senantiasa digalakkan.

Dalam konteks tersebut, Smart et al. (2019) tegas menyatakan bahwa pengagungan publikasi akademik, kutipan/sitasi dan hak kekayaan intelektual/HKI merupakan kendala yang memperlambat penemuan akademik (*slow down academic discovery*) dan mengurangi laju apropriasi/pemanfaatan hasil-hasil akademik untuk keuntungan masyarakat. Hal ini karena di era teknologis ini, “*code is modified almost continuously*” (kode dalam inovasi selalu dimodifikasi hampir tanpa henti) (p. 289), dan ketiga hal tersebut menjadi perintang *flow* inovasi.

Hal itu tidak bermakna bahwa ketiga penghambat itu ditiadakan saja, melainkan bahwa Sains Terbuka menghendaki publikasi akademik, sitasi, dan HKI dimuati dengan tuntutan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan hal ini hendaknya tercermin dalam kebijakan pendanaan proposal penelitian, kebijakan pembangunan infrastruktur riset terbuka, dan kebijakan kolaborasi terbuka antara ilmuwan dan *Quadruple Helix*.

Dalam trajektori Sains Terbuka pada sumbu negara ini, politisi memainkan peran penting untuk tidak hanya menjadikan Sains Terbuka sebagai instrumen politik sesaat, melainkan menghadirkan kebijakan jangka panjang bagi Sains Terbuka dalam rangka pembangunan untuk **misi besar** memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi besar ini hanya dapat dicapai melalui perumusan **peta jalan sains terbuka (*open science research roadmap*)** pada tingkat negara. Fungsi peta jalan ini adalah sebagai basis pembangunan infrastruktur riset dan mengkoordinasikan seluruh kebijakan riset agar sejalan dengan norma gerakan Sains Terbuka. Sebagai contoh, Kanada memiliki *roadmap for open science* (Office of the Chief Science Advisor of Canada, 2020). Salah satu rekomendasi dalam peta jalan tersebut:

“Departemen dan lembaga federal harus mengembangkan strategi dan alat untuk menerapkan prinsip data FAIR (*findable, accessible, interoperable, and reusable*) untuk memastikan interoperabilitas dari data ilmiah dan penelitian serta standar metadata pada Januari 2023, dengan rencana bertahap untuk penerapan penuh pada Januari 2025.” (p. 8)

Negara jiran, Malaysia, membangun *Malaysia Open Science Platform* (MOSP) sebagai sebuah ekosistem kolaborasi STI (*Science, technology and innovation*). Dalam situs webnya, disebutkan (Malaysia Open Science Platform, 2020):

“Tujuan dari inisiatif ini adalah menjadikan data penelitian Malaysia sebagai aset nasional yang berharga dengan mengembangkan platform terpercaya yang memungkinkan aksesibilitas dan berbagi data penelitian yang selaras dengan prioritas nasional dan praktik terbaik internasional.

Inisiatif Percontohan dengan lima Universitas Riset (RU) adalah proyek tiga tahun (2020-2022) yang didanai oleh Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI),

dipelopori oleh Malaysia Open Science Alliance dan dilaksanakan oleh Academy of Sciences Malaysia (ASM). Tiga area fokus dalam proyek ini adalah sebagai berikut: Panduan (*Guidelines*), Pembangunan Kapasitas dan Kesadaran (*Capacity Building & Awareness*), Infrastruktur (*Infrastructure*).”

Ahmed dan Othman (2021) menemukan bahwa universitas-universitas publik di Malaysia saat ini sedang mengimplementasikan kebijakan tentang bagaimana mengoperasikan dan melibatkan sepenuhnya aspek-aspek dari praktik sains terbuka, seperti data terbuka, kolaborasi terbuka, inovasi terbuka, dan sejenisnya .

India sedang dalam proses merumuskan peta jalan sains terbuka dalam *India Science, Technology, and Innovation Policy* (STIP) (Koley, 2022). Salah satu rekomendasinya adalah mengenai "*One nation, one subscription*" (Satu negara, satu subskripsi), yang berbunyi: "Pemerintah India akan bernegosiasi dengan penerbit jurnal untuk memfasilitasi akses jurnal bagi semua institusi akademik di negara ini melalui sistem pembayaran terpusat" (p. 4).

Rekomendasi lainnya yang akan diadopsi dalam peta jalan Sains Terbuka India adalah agar sumber daya ilmiah yang didanai publik seperti infrastruktur penelitian, fasilitas dan instrumen laboratorium, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dan kecerdasan buatan, dan fasilitas komputasi berkinerja tinggi, serta ruang belajar, termasuk ruang konferensi dan infrastruktur lainnya, dapat dibagikan dan diakses oleh para ilmuwan secara nasional.

Kendati demikian, peta jalan sains terbuka di berbagai negara tidak lepas dari kritik. Terdapat konsekuensi-konsekuensi tak-diniatkan (*unintended consequences*) yang mungkin muncul dari peta-peta jalan tersebut. Open Scholarship Initiative (2020) dan Poynder (2019) mendeteksi diantaranya hal-hal sebagai berikut: (1) Kesenjangan yang lebih luas antara yang kaya dan yang miskin dalam komunikasi penelitian jika APC (*article processing charge*) terlalu diandalkan untuk membayar akses terbuka; (2) Kenaifan tentang biaya sebenarnya dari solusi akses terbuka, yang mungkin tidak lebih murah dari model saat ini;

(3) Antusiasme terhadap pracetak (*preprints*) tanpa mempertimbangkan konsekuensi penuh terhadap kualitas, tinjauan sejawat, dan keseluruhan proses penerbitan; (4) "*Playwalls*" (dinding bermain) menggantikan "*paywalls*" (dinding berbayar), di mana daerah atau institusi yang kurang makmur dikecualikan dari penerbitan; dan (5) Pertukaran privasi (*privacy trade-offs*) dan biaya tersembunyi dari "kapitalisme pengawasan" (*surveillance capitalism*).

Sebagian besar konsekuensi tak-diniatkan dari pendekatan *top-down* terhadap Sains Terbuka ini disebut juga *policy alienation* (Lilja, sebagaimana dikutip dalam Chiware & Skelly, 2022), dan sebagai solusinya, pembuat kebijakan perlu **berkonsultasi dengan masyarakat sendiri** (*bottom-up*) untuk menentukan pendekatan Sains Terbuka sesuai skala kebutuhan dan nilai-nilai yang dianutnya.

Irawan et al. (2020) turut menyampaikan perhatian serupa bahwa kebijakan "*One nation, one subscription*" hanyalah sebuah bentuk konformitas terhadap oligopoli dari penerbit komersial, yang masih lebih berpihak pada keprestisiusan penerbitan penelitian daripada nilai penelitian bagi masyarakat. Berdasarkan pengalaman, Indonesia, misalnya, perlu mengeluarkan hampir 14,8 milyar Rupiah untuk biaya subskripsi *e-journal* pada 2018 (Bakrie, 2018), di mana dana sebesar ini dapat membayar penuh biaya kuliah ratusan siswa. Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah Pemerintah, atas nama masyarakat, akan membelanjakan uang publik dalam hal mana penerbit komersial akan menjadi pihak yang mendapat untung terbesar.

Sains Terbuka bukanlah hanya sebatas membuka proses riset (mengunggah dokumen pre-registrasi, data terbuka, peninjauan terbuka, dsb) tetapi juga persoalan relasi antara peneliti

dengan penerbit komersial, serta bagaimana peneliti dapat mempertahankan kepemilikan atas dokumen yang ditulisnya, sebagai buah pikirannya, agar penyebarannya dapat lestari. Sebagai contoh, sebagian dari rujukan orasi ini dapat diakses secara terbuka *bukan* di situs orisinalnya, baik yang berupa jurnal ilmiah atau media lainnya, tetapi di situs media sosial *ResearchGate* dan repositori seperti *Repec*. Untuk itu, gerakan Sains Terbuka **wajib kritis terhadap diri dan gerakannya sendiri** agar tidak terkorupsi.

Koley (2022) juga mengkritik terhadap peta jalan Sains Terbuka India yang terlalu menekankan pada sisi luaran penelitian (*output side*). Koley berpendapat bahwa keanekaragaman budaya dalam produksi pengetahuan dan integrasi berbagai sistem pengetahuan tidak mendapat pertimbangan yang semestinya dalam perbincangan Sains Terbuka India. Menurutnya, dialog Sains Terbuka India harus menemukan cara untuk membuat proses penciptaan pengetahuan lebih inklusif dan diatur secara kolektif oleh masyarakat.

Kemitraan sains terbuka antara agen masyarakat dan institusi sains sangat penting. Ia juga menyerukan agar kerangka kebijakan Sains Terbuka India harus menyertakan struktur insentif yang tepat bagi para peneliti yang akan meninggalkan faktor dampak (*impact factor*) dan sains yang didorong oleh kepentingan publikasi (*publication-driven science*) serta mempromosikan **sains yang didorong oleh kebutuhan masyarakat (*societal need-driven science*)**. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Poynder (2019) bahwa penerapan Sains Terbuka malah justru masih diiringi dengan kekeraskepalaan dalam mengandalkan faktor dampak/*impact factor* sebagai penentu tempat menerbitkan makalah, dan pengaruh faktor dampak dalam memandu keputusan penerbitan.

Oleh karena itu, trajektori “puncak” dari Sains Terbuka pada sumbu negara adalah **pengabdian kepada masyarakat**. Sains Terbuka Indonesia dengan basis etis Pancasila dan basis legal Konstitusi tidak boleh hanya dipandang sebagai gerakan teknis keterbukaan, melainkan *gerakan politis yang bermoral* untuk mengabdikan seluruh perkembangan dunia sains bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Proposisi kesebelas dari orasi ini adalah bahwa **Trajektori Sains Terbuka Indonesia merupakan arah gerak untuk mendemokratisasikan sains di Indonesia yang bertumpu pada tiga buah sumbu, yakni personal, komunitas, dan negara. Trajektori ini dapat menjadi pedoman untuk menegaskan orientasi politik dan moral sains dan teknologi Indonesia untuk menghadirkan kebermanfaatn sosial.**

Psikoinformatika dalam Trajektori Sains Terbuka Indonesia

Dalam makalah Chan et al. (2019), *Contextualizing Openness: Situating Open Science*, ada sebuah pertanyaan menggelitik dalam judul Bab 1, "*Situating Openness: Whose Open Science?*" (Menyituasikan Keterbukaan: Sains Terbuka ‘miliknya’ siapa?). Mereka merincikan pertanyaan tersebut menjadi anak-anak pertanyaan, sebagai berikut:

"Sains siapakah yang terbuka? Oleh siapakah? Siapakah yang akan mendapat manfaat dari peningkatan dan praktik ini? Apa saja risikonya? Apakah hal ini akan mengarah pada kesetaraan dan pemerataan akses dan produksi pengetahuan oleh para peneliti dalam situasi/*setting* yang tidak setara? Akankah Sains Terbuka mengganggu struktur legitimasi pengetahuan global yang ada? Apakah ini akan mengarah pada marjinalisasi pengetahuan lebih lanjut dari Negara-negara Selatan (*Global South*)? Bagaimana Sains Terbuka berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?" (p. 5)

Kesimpulan tentatif mereka di awal bab adalah bahwa "*Openness is situated and highly conditional on the conditions of knowledge production*" (p. 14).

Pada era Revolusi Industri 4.0 ini, terdapat sebuah cabang psikologi baru yang turut mempertanyakan bagaimana mengakomodasikan "situasionalitas" dalam memahami dinamika psikologis manusia, yakni Psikoinformatika (*Psychoinformatics*).

Psikoinformatika merupakan sub-disiplin baru yang menggunakan alat dan teknik dari komputer dan ilmu informasi untuk meningkatkan pemerolehan, peorganisasian, dan sintesis data psikologis (Yarkoni, 2012a). Definisi lainnya dari psikoinformatika adalah kerja sama antara disiplin psikologi dan ilmu komputer dalam menangani kumpulan data besar yang berasal dari perangkat yang sering digunakan, seperti ponsel cerdas atau situs jejaring sosial daring, untuk menjelaskan sejumlah besar ciri psikologis, termasuk kepribadian dan suasana hati (Cipresso et al., 2017). Persamaan kedua definisi tersebut adalah melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu (psikologi dan ilmu komputer) dalam pengolahan dan pemodelan data psikologis guna menjawab persoalan psikologis manusia.

Perkembangan teknologi yang memukau kita ternyata tidak selalu berimplikasi bahwa kita memahami manusia dengan lebih baik. Sood (2020) mengajukan proposisi kritis terhadap Psikologi dalam kerja-kerja bersamanya dengan informatika, sebagai berikut:

"Masih menjadi pertanyaan terbuka apakah para psikolog telah sepenuhnya memperhitungkan kemanusiaan khususnya dalam hal interaksi orang-situasi (*person-situation interaction*). Konstruk ilmiah paling mapan yang paling dekat dengan "orang" adalah kepribadian. Situasi, di sisi lain, tidak memiliki istilah yang sesuai untuk menunjukkan situasionalitas. Bagaimanapun, saat ini, yang paling tidak lengkap adalah integrasi pemahaman ini ke dalam konteks informatika yang sesuai. Bagaimana ini bisa dicapai untuk interaksi orang-situasi dan kemanusiaan psikologis?" (p. 499-500)

Untuk lebih jelasnya, disajikan paragraf dalam bahasa aslinya, sebagai berikut [*cetak tebal oleh penulis*]:

*"It remains an open question whether psychologists have fully accounted for **humanness** specifically in terms of person-situation interaction. The best-established scientific construct that is closest to "person" is personality. **Situations, on the other hand, have no corresponding term denoting situationality.** In any case, at present, **what remains most incomplete** is the integration of these understandings into suitable informatic contexts. How might this be achieved for both person-situation interaction and psychological humanness?"* (p. 499-500)

Korupsi ilmu tentang manusia sesungguhnya terjadi manakala pengabaian situasionalitas dalam memahami manusia melalui informatika dibiarkan terus-menerus. *Situatedness* sudah lama dibincangkan dalam filsafat, namun jarang - kalau bukan tidak pernah - diurus secara serius hingga saat ini (Costello, 2014; Von Maur, 2021). Manusia mengkorupsi manusia lain ketika melakukan penyimpulan atas manusia lain dengan *bias kepribadian* sambil mengorbankan pemahaman yang utuh dan memperoleh keuntungan finansial dari "bisnis kepribadian" (*the business of personality typing* - Macabasco, 2021). Tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga asesmen kepribadian pernah diduga menjadi instrumen politik di Indonesia (misal, Wieringa, 2018), meskipun dugaan tersebut memerlukan klarifikasi dan penyelidikan ilmiah dari para pihak yang berkepentingan, dan karenanya dugaan tersebut harus tidak kita terima sebagai sebuah kebenaran ilmiah saat ini.

Psikoinformatika sangat potensial membantu meningkatkan mutu aspek prosedural penelitian psikologi, termasuk **prosedur penelitian dan asesmen yang secara serius mempertimbangkan situasi**. Psikoinformatika berpeluang untuk mengembangkan alat bahkan platform untuk mengatasi permasalahan yang berdampak pada ketidak-kredibelan psikologi, seperti kurangnya perhatian terhadap replikabilitas/reprodusibilitas, lemahnya standar pelaporan, serta kurang andalnya tinjauan sejawat (*peer review*) (Yarkoni, 2012b).

Tiga buah contoh aplikasi psikoinformatika adalah *CurateScience* (<https://curatescience.org/>), serta *PsychFileDrawer* (lihat <https://twitter.com/psychfiledrawer>), yang mengarsipkan dan menganalisis secara daring berbagai upaya replikasi dalam psikologi, dan *Psychological Science Accelerator* (<https://psysciacc.org/>), sebuah laboratorium terbuka yang mengkoordinasikan pengumpulan data psikologis dari seluruh dunia.

Aplikasi psikoinformatika lainnya yang dapat dibayangkan, misalnya adalah algoritma kontrol kualitas otomatis yang mendeteksi pola yang menunjukkan bias publikasi (misalnya, mendeteksi apakah terlalu banyak luaran riset yang hanya mengejar nilai signifikansi statistik $p < 0.05$), model publikasi baru yang menekankan ulasan terbuka pascapublikasi daripada prapublikasi, atau alat penambahan teks yang secara otomatis mengidentifikasi hubungan tak terduga antartemuan dalam berbagai bidang psikologi (Yarkoni, 2012b).

Dengan demikian, proposisi kedua belas dari orasi ini adalah bahwa **Psikoinformatika memperlengkapi Sains Terbuka dalam trajektorinya melawan korupsi ilmu**.

Ibu/Bapak, Hadirin yang saya hormati,

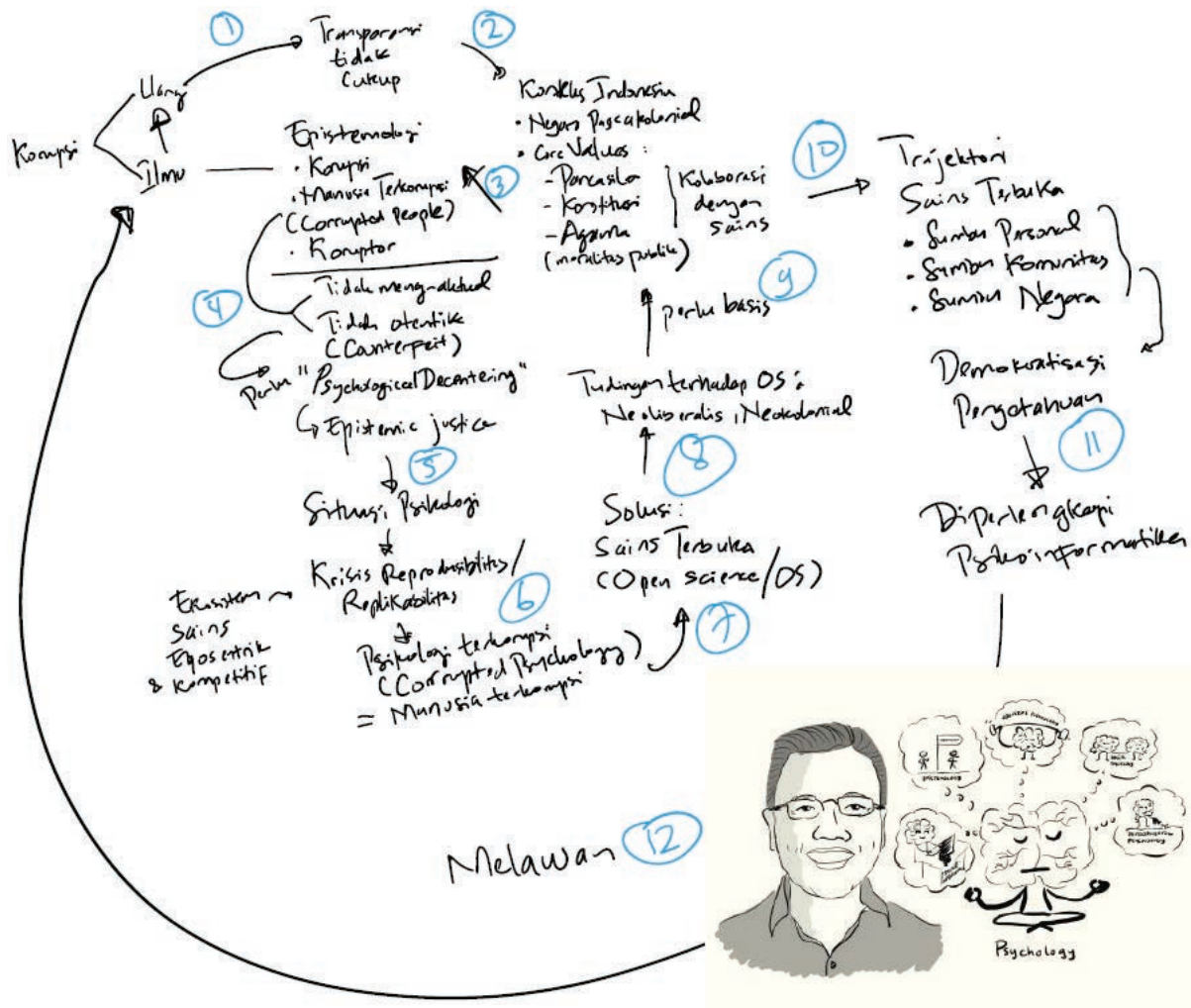
Sebagai penutup orasi ini, saya menegaskan kembali secara rangkaian pokok-pokok pikiran dalam orasi ini, sebagaimana tampak pada Gambar 3.

Korupsi berpangkal pada korupsi ilmu. Keduanya memiliki kompatibilitas. Baik otoritas publik maupun otoritas sains kehilangan kualitas-kualitas positifnya karena misapropriasi, penyalahgunaan otoritas yang dipercayakan, untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih sempit.

Transparansi merupakan syarat perlu (*necessary condition*) untuk mengatasi korupsi, namun tidak cukup (*insufficient*). Transparansi tanpa pengertian/pengetahuan/pemahaman hanya akan menghasilkan korupsi terbuka (*open corruption*). Gejala ini menunjukkan penampakan yang palsu, seolah-olah antikorupsi (dengan menggaungkan transparansi) namun di baliknya melestarikan bahkan terus membangun sistem yang korup, yang ditonton warga secara terbuka. Untuk itu, definisi, pengetahuan (*episteme*), dan narasi tentang korupsi di Indonesia, setidaknya secara kultural, perlu memuat konteks Indonesia sebagai negara pascakolonial, dan negara yang memiliki nilai-nilai fundamental, seperti Pancasila, Konstitusi (yang memuat tujuan negara), dan Agama (dalam hal ini sebagai spiritualitas dan moralitas publik).

Kita hendak mencapai sebuah epistemologi tentang 'korupsi' (*corruption*), 'manusia terkorupsi' (*corrupted people*), dan 'koruptor', yang tidak hanya terbatas pada definisi yuridis. Melalui kolaborasi antara sains psikologi dan nilai-nilai spiritual orang Indonesia, sebagai contoh, secara tentatif ditemukan bahwa manusia yang terkorupsi adalah manusia yang tidak mengaktual, terpusat pada ego (*ego-centered*), dan tidak otentik (*counterfeit*), sehingga tidak mampu membedakan antara aku (*me*) dan daku (*mine*). Untuk itu, diperlukan *psychological decentering* (selain dalam Islam, juga ditemukan dalam spiritualitas Timur) - yang menguatkan solidaritas, empati, dan cinta, yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

“Kembali kepada nilai-nilai” dalam hal ini bukan merupakan sebuah kemunduran (regresi), karena seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, nilai-nilai spiritualitas dari agama, misalnya, mendorong keberanian moral (*moral courage*) dan hal ini sangat dibutuhkan dewasa ini dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi, misalnya dalam pelaporan sebagai seorang peniup peluit (*whistleblower*) [dalam dunia sains Indonesia, kita pernah memiliki formulir pelaporan di portal Anjungan Integritas Akademik (ANJANI, n.d.), dan di berbagai Kementerian kini ada *whistleblowing system*].



Gambar 3. Ringkasan Pokok Pikiran

Epistemologi yang adil (*epistemic justice*) yang menggabungkan Timur-Barat atau Selatan-Utara akan menginspirasi sains psikologi korupsi yang kuat. Sayangnya situasi psikologi hari ini adalah psikologi yang dilanda oleh krisis reproduibilitas/replikabilitas (akibat tekanan ekosistem sains yang egosentrik dan kompetitif, menghasilkan kepalsuan), diantaranya akibat bias-bias publikasi ilmiah, standar pelaporan yang lemah, dan penyalahgunaan metrik-sederhana publikasi (seperti jumlah publikasi, sitasi, H-index). Krisis ini telah meluhlantakkan sejumlah temuan psikologi yang pernah dianggap kuat (*robust*) di banyak cabang psikologi.

Psikologi yang demikian adalah psikologi terkorupsi (*corrupted psychology*) dan dapat dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti menyesatkan publik dan merusak kepercayaan publik terhadap psikologi. Jika psikologi terkorupsi, maka (pemahaman tentang) manusia pun terkorupsi.

Sains Terbuka (*Open Science*) hadir sebagai solusi untuk mengatasi korupsi ilmu sejak dari pembentukan ilmu. Dalam hal ini, Sains Terbuka bukan hanya sebatas membuat proses-proses penelitian (yang menghasilkan sains) menjadi terbuka/transparan (dengan preregistrasi riset, protokol terbuka, laboratorium terbuka, data terbuka, akses terbuka, sitasi terbuka, ulasan pascapublikasi, dan sebagainya) sehingga dapat diverifikasi siapapun. Melainkan juga, Sains Terbuka menghendaki keterlibatan warga (*public engagement, citizen science*) dan menghasilkan sains yang terkomunikasikan dengan baik pada masyarakat (sebagai pemangku kepentingan sains yang utama).

Masalahnya, Sains Terbuka juga tidak lepas dari tuduhan-tuduhan, seperti ada tuduhan bahwa Sains Terbuka bermuatan ideologi neoliberal untuk menyerahkan proses sains kepada pasar, juga sedang mempromosikan model bisnis akademik yang baru di tengah kejenuhan proses sains saat ini, serta menjadikan warga hanya sebagai "pekerja lepas" yang dieksploitasi secara kognitif (misalnya, Hillyer, 2017). Oleh karenanya, Sains Terbuka Indonesia memerlukan basis yang kuat dalam konteks Indonesia, yaitu Pancasila, Konstitusi, dan Agama.

Orasi ini menawarkan Trajektori Sains Terbuka Indonesia dengan melandaskan diri pada basis yang kuat itu. Rangka dari trajektori ini terdiri atas tiga sumbu, yakni sumbu personal, sumbu komunitas, dan sumbu negara. Resultan ketiganya diharapkan menuju pada demokratisasi pengetahuan, dan semakin efektif saat diperlengkapi dengan psikoinformatika.

Sumbu personal dari trajektori mendorong untuk menghubungkan aktivitas Sains Terbuka Indonesia (yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, persatuan, kemanusiaan, keTuhanan dan keadilan) dengan kesehatan dan kesejahteraan pribadi para dosen/peneliti, memberikan insentif terhadap "karier sains terbuka" mereka, serta pengembangan ilmu yang tidak berlandaskan pada evaluasi kinerja yang gampang dicurangi/dipermainkan (misalnya penggunaan metrik sederhana).

Sumbu komunitas dari trajektori mendorong agar para ilmuwan melibatkan warga bukan hanya sebagai pekerja lepas pengumpul data, melainkan meningkatkan kapasitas mereka untuk berjejaring dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah serta khususnya prinsip-prinsip keterbukaan dalam hidup keseharian mereka.

Oleh karenanya gejala kelompok dalam berjejaring di komunitas yang menghambat penemuan akademik juga harus dilawan - seperti yang dikenal dalam psikologi sosial merupakan gejala kolektivitas yang buruk yang menghambat pengambilan keputusan yang efektif - yakni berpikir-kelompok (*groupthink*) dan pengutuban kelompok (*group polarization*).

Selain mengapresiasi kebijaksanaan orang banyak (*wisdom of the crowd*), tindakan-tindakan edukatif dalam komunitas yang memfasilitasi pembudayaan dan pelaksanaan kebajikan keilmuan, seperti mengembangkan karakter epistemik, sangat dibutuhkan. Perlu ditumbuhkan model-model organisasional yang menjembatani asosiasi profesi dengan komunitas warga yang berminat terhadap pengembangan ilmu. Mereka bersama menjadi pengawal sains agar ilmu tidak kembali dikorupsi.

Sumbu negara dari trajektori mendorong agar politisi berdasarkan Pancasila dan konstitusi, secara aktif *melawan* model sains yang berpusat pada kapitalisme akademik dan yang melestarikan ketidakadilan epistemik. Pada sumbu negara ini, para politisi khususnya mereka

yang menduduki jabatan publik diminta untuk mendorong struktur kebijakan yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan penemuan akademik dari ilmuwan maupun warga umumnya, seperti memperoleh informasi, mengkritik argumen, memperdebatkan ide, mengevaluasi bukti, dan menelaah berbagai proposal kebijakan publik. Hal ini diyakini akan turut menguatkan selain sains itu sendiri tetapi juga lembaga-lembaga politik menjadi jauh lebih efisien, serta memenuhi mandat masyarakat secara lebih efektif.

Mulai dengan berjejaring mengadvokasi pengetahuan atau sains sebagai barang publik, dan menjadikan Sains Terbuka sebagai salah satu metode penting dari pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, dan karenanya merumuskan peta jalan sains terbuka nasional dengan mempertimbangkan masukan masyarakat.

Trajektori yang merupakan gabungan ketiga sumbu inilah yang akan menjadi kerangka kerja kita dalam melawan korupsi ilmu. Trajektori ini akan melengkapi upaya Universitas Bina Nusantara yang sudah memiliki dua kebijakan institusional yang penting, yaitu (1) Mahasiswa nyontek dikeluarkan dari universitas, (2) Alumni yang korupsi, dicabut gelar sarjananya (Kompas.com, 2021), serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Di samping itu, orasi ini dapat dipandang sebagai kesinambungan inisiatif Tim Sains Terbuka Indonesia dalam mempromosikan demokratisasi pengetahuan melalui gerakan sains terbuka sejak 2017 (J. Abraham et al., 2019; Irawan et al., 2017). Saat ini kita semakin membutuhkan teladan positif yang menjadi model kebajikan epistemik, yang memberikan inspirasi dan demonstrasi praktis dari kebajikan yang dapat dimasukkan ke dalam etos kelembagaan. Tanpa teladan kebajikan, kita kehilangan cara penting untuk mendorong dan mempertahankan etos kelembagaan yang berbudi luhur secara epistemis.

Dalam konteks itu, Psikoinformatika yang diintegrasikan dengan Trajektori Sains Terbuka Indonesia sangat potensial sebagai alat melawan korupsi ilmu, dengan memperhitungkan secara serius dimensi-dimensi situasional dan kontekstual, lebih-lebih di tengah model-model teoretis yang sudah populer seperti teori *fraud triangle* dari Cressey (1953) - yang terdiri atas kombinasi tekanan (*pressure*), opportunity (*peluang*), dan rasionalisasi - dalam menjelaskan korupsi sudah tidak memadai lagi (Lokanan, 2015).

Melawan korupsi berawal dari melawan korupsi ilmu, dan melawan korupsi ilmu berawal dari epistemologi yang tepat tentang korupsi, dan episteme yang tepat tidak mungkin dihasilkan oleh proses sains yang terkorupsi (*corrupted*). Ilmu yang terkorupsi adalah ilmu yang orientasinya bukan sebagai barang publik (*public goods*), melainkan memiliki motif kepentingan privat (finansial, prestise), memiliki bias ideologis, dan hasil dari tekanan yang terlampau besar untuk menghasilkan luaran. Sains Terbuka bersama Psikoinformatika hadir dengan upaya-upaya mencegah dihasilkannya sains yang terkorupsi, untuk masa depan psikologi dan pembangunan yang lebih baik. Pembangunan hanya akan efektif apabila didasarkan pada kebijakan publik yang melandaskan diri pada sains yang berintegritas, kuat, dan berorientasi pada masyarakat.

Referensi

- Abraham, J. (2017, February 16). Pelajaran dari Nobel Laureate tentang keragaman dalam penelitian. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/juneman/58a57ea8b57a61883c9245e5/pelajaran-dari-nobel-laureate-tentang-keragaman-dalam-penelitian>
- Abraham, J. (2018). Kebebasan akademik: Melanjutkan gagasan psikologi perguruan tinggi. Dalam Mairuhu, D., Anam, F., & Buyang, J. (Eds.), *Kajian pendidikan tinggi IDRI untuk DPR RI dan Ristek Dikti 2018* (pp. 39-49). ITB Press. <https://doi.org/10.31227/osf.io/q5nce>.
- Abraham, J., & Gunawan, H. (2014). Moral emotions, income sufficiency, family self-sufficiency, and selflessness. *Proceedings of SGEM*, 241-248. https://www.researchgate.net/publication/299750139_MORAL_EMOTIONS_INCOME_SUFFICIENCY_FAMILY_SELF-SUFFICIENCY_AND_SELFLESSNESS.
- Abraham, J., & Rufaedah, A. (2014). "Theologization" of psychology and "psychologization" of religion: How do psychology and religion supposedly contribute to prevent and overcome social conflicts?. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 516-525. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.064>.
- Abraham, J., Irawan, D. E., & Dalimunthe, S. (2019). Jalan evolusi bibliometrik Indonesia. *The Conversation*. Diakses dari <https://theconversation.com/jalan-evolusi-bibliometrik-indonesia-104781>.
- Abraham, J., Irawan, D. E., & Dalimunthe, S. (2019, Februari 27). Democratizing knowledge for our dreams. *The Jakarta Post*. Diakses dari https://juneman.medium.com/demokratisasikan-pengetahuan-the-jakarta-post-27-februari-2019-cf99641a342?source=user_profile-----32-----
- Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2018a). The psychology of corruption: The role of the counterfeit self, entity self-theory, and outcome-based ethical mindset. *Journal of Psychological & Educational Research*, 26(2), 7-32. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3314532.
- Abraham, J., Takwin, B., & Suleeman, J. (2018b). Counterfeit self: A confirmatory factor analysis among Indonesians. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(3), 518-525. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.011>.
- Adam, I., & Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. *Information Economics and Policy*, 57, 100950. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2021.100950>.
- Ahmed, M., & Othman, R. (2021). Readiness towards the implementation of open science initiatives in the Malaysian Comprehensive Public Universities. *The Journal of Academic Librarianship*, 47(5), 102368. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102368>.
- ALLEA. (2022). ALIGNING intellectual property rights with open science: ALLEA Statement. Diakses dari <https://allea.org/wp-content/uploads/2022/04/ALLEA-Statement-Aligning-IPR-with-Open-Science.pdf>.
- Amindoni, A. (2018, Maret 29). Kasus korupsi Gubernur Sultra Nur Alam menjadi 'terobosan' KPK berantas korupsi sumber daya alam. *BBC*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43554605>.
- Anderson, M. S., Ronning, E. A., Vries, R. D., & Martinson, B. C. (2010). Extending the Mertonian norms: Scientists' subscription to norms of research. *The Journal of Higher Education*, 81(3), 366-393.

- https://www.researchgate.net/publication/49658775_Extending_the_Mertonian_Norms_Scientists'_Subscription_to_Norms_of_Research.
- Ang, Y. Y. (2020). Unbundling corruption: Why it matters and how to do it. Diakses dari <https://oecd-development-matters.org/2020/06/25/unbundling-corruption-why-it-matters-and-how-to-do-it/>.
- ANJANI. (n.d.). Prosedur pelaporan. <https://anjani.kemdikbud.go.id/contents/prosedur-pelaporan-78074230?ctx=prosedur-pelaporan>
- APA.org. (2023). Moral consistency. *APA Dictionary of Psychology*. Diakses dari <https://dictionary.apa.org/moral-consistency>.
- Arfan, A., As'ad, A. A., & Nugroho, A. D. (2018). Linking open access movement to the Indonesian Islamic higher education. <https://doi.org/10.2991/aes-18.2019.9>.
- Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues. *United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 1(10)*, 1-10. Diakses dari <https://www.insightsonindia.com/wp-content/uploads/2013/09/integrity-transparency-un.pdf>.
- Bakrie, M. (2018, Agustus 15). Kemenristekdikti Berlangganan E-Journal Senilai Rp.14,8 M, Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa dapat Mengakses Secara Gratis. <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2018/08/15/kemenristekdikti-berlangganan-e-journal-senilai-rp-148-m-dosen-peneliti-dan-mahasiswa-dapat-mengakses-secara-gratis/>.
- Bazzoli, A. (2022). Open science and epistemic pluralism: A tale of many perils and some opportunities. *Industrial and Organizational Psychology, 15(4)*, 525-528. Diakses dari <https://www.cambridge.org/core/journals/industrial-and-organizational-psychology/article/abs/open-science-and-epistemic-pluralism-a-tale-of-many-perils-and-some-opportunities/489D39929875DF79E3CD248654C1D58E>.
- Becerril-Garcia, A. [@ariannabec]. (2019, December 2). [Tweet]. We totally join to Indonesia call for values #OpenAccess, great presentation by @keincealed at @KU_Leuven thanks @viroviacum for making this event possible. *Twitter*. <https://twitter.com/ariannabec/status/1201508622104244224>.
- Becerrill-García, A. (2023). The unique opportunity to advance science as a global public good: open science in a world of contrasts. Diakses dari https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/keynote_arianna_becerril.pdf.
- Bernas.id. (2017). Korupsi dipandang dari sisi psikologi sosial. diakses dari <https://www.bernas.id/2017/11/63312/52619-korupsi-dipandang-dari-sisi-psikologi-sosial/>.
- Bland, A. M., & DeRobertis, E. M. (2020). Maslow's unacknowledged contributions to developmental psychology. *Journal of Humanistic Psychology, 60(6)*, 934-958. https://www.researchgate.net/publication/254861388_Maslow's_Hierarchy_of_Needs.
- Boontanom, P. R. (2019). Social responsibility of lawyers in reporting suspicious transactions under money laundering measurement. *Social Science Asia, 5(2)*, 56-99. <https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia/article/view/160>.
- Branney, P., Brooks, J., Kilby, L., Newman, K. L., Norris, E., Pownall, M., ... & Whitaker, C. (2023). Three steps to open science for qualitative research in psychology. *Social and Personality Psychology Compass*. Advanced Online Publication. <https://doi.org/10.1111/spc3.12728>
- Briggle, A., Frodeman, R., & Holbrook, B. (2015, Mei 26) The impact of Philosophy and the philosophy of Impact: A guide to charting more diffuse influences across time. *Impact of*

- Social Sciences Blog* (26 May 2015). <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/05/26/the-impact-of-philosophy-and-the-philosophy-of-impact/>.
- Burgess-Jackson, K. (2020). Why I publish in "predatory" journals-and why you should, too. *Philosophy International Journal*, 3(4), 000160. <https://doi.org/10.23880/phij-16000160>.
- Canadian Commission for UNESCO (2020). Open science beyond open access: For and with communities, a step towards the decolonization of knowledge. Diakses dari https://unescochair-cbrsr.org/wp-content/uploads/2020/07/OS_For_and_With_Communities_EN.pdf.
- Canhoto, A. I. (2008). Barriers to segmentation implementation in money laundering detection. *The Marketing Review*, 8(2), 163-181. https://www.researchgate.net/publication/233711890_Barriers_to_segmentation_implementation_in_money_laundering_detection.
- Castille, C. M., Köhler, T., & O'Boyle, E. H. (2022). A brighter vision of the potential of open science for benefiting practice: A ManyOrgs proposal. *Industrial and Organizational Psychology*, 15(4), 546-550. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/q4r97.html>.
- Chan, L., Okune, A., Hillyer, R., Albornoz, D., & Posada, A. (2019). *Contextualizing openness: Situating open science*. University of Ottawa Press, IDRC. Diakses dari <https://www.idrc.ca/en/book/contextualizing-openness-situating-open-science>.
- Chiwere, E. R. T., & Skelly, L. (2022). Open Science in Africa: What policymakers should consider. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 7, 950139. <https://doi.org/10.3389/frma.2022.950139>.
- Cipresso, P., Matic, A., Lopez, G., & Serino, S. (2017). Computational paradigms for mental health. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/5607631>.
- Clippinger, J. A. (1973). Toward a human psychology of personality. *Journal of Religion and Health*, 12, 241-258. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1WgkS6HbecI1aTE_XfhStIyqXCDB6Qvj-/view?usp=sharing.
- Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning. *American Psychological Association*. Diakses dari <https://www.apa.org/monitor/2015/09/top-principles>.
- Cochrane, J. R. (1999). Corruption and the role of religion in public life. In S. Sangweni & D. Balia (Eds.), *Fighting corruption: South African perspectives* (pp. 41-57). University of South Africa Press. Diakses dari https://www.academia.edu/en/35188637/corruption_and_the_role_of_religion_in_public_life_w_postscript_2017.
- Compton, W. C. (2018). Self-Actualization myths: What did Maslow really say? *Journal of Humanistic Psychology*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/323921573_Self-Actualization_Myths_What_Did_Maslow_Really_Say.
- Costello, M. (2014). Situatedness. In T. Teo (Ed.), *Encyclopedia of critical psychology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_470
- Couée, I. (2020). Restoring public trust in science with the help of the humanities. *EMBO reports*, 21(8), e50796. <https://doi.org/10.15252%2Fembr.202050796>.
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Wadsworth.

- Cuijpers P., Smit F., Bohlmeijer E., Hollon S. D., Andersson G. (2010). Efficacy of cognitive-behavioural therapy and other psychological treatments for adult depression: Meta-analytic study of publication bias. *The British Journal of Psychiatry*, 196, 173–178. <https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/efficacy-of-cognitive-behavioural-therapy-and-other-psychological-treatments-for-adult-depression-meta-analytic-study-of-publication-bias/585841C1FAC63E0AAC140BA1557AEACA>.
- Dalimunthe, S., Afrilya, A., Abraham, J., Irawan, D. E., & Dipura, S. K. (n.d.). Strategi pengembangan sains/pengetahuan terbuka. Diakses dari <https://sainsterbuka.readthedocs.io/en/latest/>.
- DeCarvalho, R. J. (1991). Abraham H. Maslow (1908-1970) An Intellectual Biography. *Thought: Fordham University Quarterly*, 66(1), 32-50. https://www.academia.edu/39214161/AN_INTELLECTUAL_BIOGRAPHY.
- Deklarasi San Francisco tentang Penilaian Penelitian. (2020). Retrieved from https://sfdora.org/wp-content/uploads/2020/12/DORA_Indonesian.pdf [Terjemahan Indonesia oleh Eric Kunto Aribowo, Mezia Kemala Sari, Surya Darma Hamonangan, Juneman Abraham, dan Dasapta Erwin Irawan].
- Denisova-Schmidt, E. (2018). Corruption, the lack of academic integrity and other ethical issues in higher education: What can be done within the Bologna Process? In A. Curaj, L. Deca, & R. Pricopie (Eds.), *European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies* (pp. 61-75). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77407-7_5.
- Dominik, M., Nzweundji, J. G., Ahmed, N., Carnicelli, S., Mat Jalaluddin, N. S., Fernandez Rivas, D., ... & Rios Rojas, C. (2022). Open Science—for whom?. *Data Science Journal*, 21(1), 1. <http://doi.org/10.5334/dsj-2022-001>.
- DORA. (2020). The intersections between DORA, open scholarship, and equity. Diakses dari <https://sfdora.org/2020/08/18/the-intersections-between-dora-open-scholarship-and-equity/>.
- Efendic, E., & Van Zyl, L. E. (2019). On reproducibility and replicability: Arguing for open science practices and methodological improvements at the South African Journal of Industrial Psychology. *SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde*, 45, a1607. <https://doi.org/10.4102/sajip.v45i0.1607>.
- Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open science: One term, five schools of thought. In S. Bartling & S. Friesike (Eds.), *Opening science: The evolving guide on how the internet is changing research, collaboration and scholarly publishing* (pp. 17-47). Springer.
- Flis, I. (2019). Psychologists psychologizing scientific psychology: An epistemological reading of the replication crisis. *Theory & Psychology*, 29(2), 158-181. <https://doi.org/10.1177/0959354319835322>.
- Garcia, D. R. (2018, July 5). Transparency isn't the solution to corruption - here's why. *One Young World*. <https://www.oneyoungworld.com/blog/why-transparency-isnt-solution>.
- Gokcekus, O., & Ekici, T. (2020). Religion, religiosity, and corruption. *Review of Religious Research*, 62, 563-581. https://www.academia.edu/89064527/Religion_Religiosity_and_Corruption.
- Grahe, J. E., Cuccolo, K., Leighton, D. C., & Cramblet Alvarez, L. D. (2020). Open science promotes diverse, just, and sustainable research and educational outcomes. *Psychology Learning & Teaching*, 19(1), 5-20. Diakses dari <https://www.plu.edu/psychology/wp-content/uploads/sites/60/2019/08/grahe-paper.pdf>
- Hallak, J., & Poisson, M. (2007). Corrupt schools, corrupt universities: What can be done?. *International Institute for Educational Planning*. Diakses dari

- Handoyo, L. C. et al. (2019). *Sosiologi korupsi: Kasus korupsi di lembaga negara Indonesia*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. https://books.google.co.id/books/about/Sosiologi_Korupsi_Kasus_Korupsi_di_Lemba.htm?id=fEBbEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Hengartner, M. P. (2018). Raising awareness for the replication crisis in clinical psychology by focusing on inconsistencies in psychotherapy research: How much can we rely on published findings from efficacy trials? *Frontiers in Psychology*, 9, 256. <https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2018.00256>.
- Herry Priyono, B. (2018). *Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi*. Gramedia Pustaka Utama. Diakses dari <http://repo.driyarkara.ac.id/25/>.
- Hesse, B. W. (2018). Can psychology walk the walk of open science? *American Psychologist*, 73(2), 126. https://www.researchgate.net/publication/323405711_Can_psychology_walk_the_walk_of_open_science.
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429-431. <https://doi.org/10.1038/520429a>.
- Hillyer, R., Posada, A., Albornoz, D., Chan, L., & Okune, A. (2017). Framing a situated and inclusive open science: emerging lessons from the open and collaborative science in development network. In L. Chan & F. Loizides (Eds.), *Expanding perspectives on open science: Communities, cultures and diversity in concepts and practices* (pp. 18-33). IOS Press.
- Ho, D. Y. F. (1995). Selfhood and identity in Confucianism, Taoism, Buddhism, and Hinduism: Contrasts with the West. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 25(2), 115-139. Diakses dari <https://www.humiliationstudies.org/documents/HoSelfhoodandIdentityinConfucianismTaoismBuddhismandHinduism.pdf>.
- Hoffman, E., & Compton, W. C. (2022). The Dao of Maslow: A new direction for mentorship. *Journal of Humanistic Psychology*, 00221678221076574. Diakses dari <https://oneuponedown.org/wp-content/uploads/mentorship-dao.pdf>.
- Hofmann, B. (2022). Open science knowledge production: Addressing epistemological challenges and ethical implications. *Publications*, 10(3), 24. <http://doi.org/10.3390/publications10030024>.
- Horgan, J. (2020, May 20). One of the world's most powerful scientists believes in miracles. *Scientific American*. Diakses dari <https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/one-of-the-worlds-most-powerful-scientists-believes-in-miracles/>.
- Hunter, A. A. (2021). *Co-developing openness: Indigenous knowledge and data governance and open science in Canada*. Unpublished Doctoral dissertation, Carleton University, Ontario, Canada. Diakses dari https://curve.carleton.ca/system/files/etd/2edbbabc-6113-4893-a700-e6bdba20bbd2/etd_pdf/0a497b7993be4d55cf412f1b9f1fa428/hunter-codevelopingopennessindigenousknowledgeand_r.pdf.
- Ibrahim, A. (2022). The journey for epistemological justice. In Z. Sardar (Ed.), *Emerging epistemologies: The changing fabric of knowledge in postnormal times* (pp. 156-172). International Institute of Islamic Thought, and Centre for Postnormal Policy & Futures Studies. Diakses dari <https://iiit.org/en/book/emerging-epistemologies-the-changing-fabric-of-knowledge-in-postnormal-times/>.
- Irawan, D. E., Abraham, J., Zein, R. A., Ridlo, I. A., & Wibowo, E. K. (2020). Open access in Indonesia - *RINarxiv*. <https://rinarxiv.lipi.go.id/lipi/preprint/view/9>.

- Irawan, D. E., Abraham, J., Zein, R. A., & Gutam, S. (2020, November 3). India's plan to pay journal subscription fees for all its citizen may end up making science harder to access. *The Conversation*. Diakses dari <https://theconversation.com/indias-plan-to-pay-journal-subscription-fees-for-all-its-citizen-may-end-up-making-science-harder-to-access-147444>.
- Irawan, D. E., Rachmi, C. N., Irawan, H., Abraham, J., Kusno, K., Multazam, M. T., ... & Aziz, N. A. (2017). Penerapan open science di Indonesia agar riset lebih terbuka, mudah diakses, dan meningkatkan dampak saintifik. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 13(1), 25-36.
- Irawanto, D. W., & Novianti, K. R. (2020). Exploring the nature of whistle blowing in organizations in Asia: An integrative perspective. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 519-528. https://www.researchgate.net/publication/346703684_Exploring_the_Nature_of_Whistle_Blowing_in_Organizations_in_Asia_An_Integrative_Perspective.
- Jafari, M. (2022). Historical developments of the concept and realm of corruption in ancient times. *Criminal Law Research*, 13(2), 33-55. Diakses dari <http://ensani.ir/file/download/article/1674456964-9478-1401-2-2.pdf>.
- de la Cueva, J., & Méndez, E. (2022). Open Science and Intellectual Property Rights, How can they better interact? State of the art and reflections: Report of Study. Diakses dari https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-04/ec_rtd_open-science-and-ip-report.pdf.
- Jeong, D., Shenoy, A., & Zimmermann, L. (2018). *Are transparency and accountability enough? Open corruption and why it exists*. Working Paper No. 745. Diakses dari <https://www.isid.ac.in/~epu/acegd2018/papers/LauraZimmermann.pdf>.
- Juneman, J., Putra, F., & Meinarno, E. A. (2012). Kompatibilitas keutamaan karakter dengan nilai-nilai Pancasila: perspektif kontrak psikologis dan kontrak sosial. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 3(1), 253-260. Diakses dari https://www.academia.edu/2220233/Kompatibilitas_Keutamaan_Karakter_Dengan_Nilai_Nilai_Pancasila_Perspektif_Kontrak_Psikologis_dan_Kontrak_Sosial.
- Kaffenberger, M. (2012). The effect of educational attainment on corruption participation in Sub-Saharan Africa. Unpublished Master's Thesis. Vanderbilt University, Nashville, TN. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/216051169.pdf>
- Kazmi, Y. (2000). Historical consciousness and the notion of the authentic self in the Qur'an: Towards an Islamic critical theory. *Islamic Studies*, 39(3), 375-398. <http://irep.iium.edu.my/34208/>.
- Khoirin, N., & Junaedi, M. (2022). Religious inconsistency on corruption behaviour among Muslim politicians in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), a7361. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7361>.
- Kidd, I. J. (2017). Epistemic injustice and religion. In I. J. Kidd, J. Medina, & G. Pohlhaus (Eds.), *The Routledge handbook to epistemic injustice* (pp. 386-396). Routledge. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00344087.2022.2030095?needAccess=true&role=button>.
- Kim, P. S. (2008). A daunting task in Asia: The move for transparency and accountability in the Asian public sector. *Public Management Review*, 10(4), 527-537. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/16e_8L_-I3MHdulVh0WFELconkK3u9FrT/view?usp=sharing.

- Knöchelmann, M. (2021). The democratisation myth: Open Access and the solidification of epistemic injustices. *Science & Technology Studies*, 34(2), 65-89. <https://doi.org/10.23987/sts.94964>.
- Koley, M. (2022). Analysis of open science policy recommendations proposed in India's 5th science. *Technology & Innovation Policy Draft*, 21(2), 1-8. <https://doi.org/10.38126/JSPG210208>.
- Kompas.com. (2021). Mahfud MD: Koruptor di Indonesia 1298 orang, 86 persen lulusan perguruan tinggi. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/10/21/203257178/mahfud-md-koruptor-di-indonesia-1298-orang-86-persen-lulusan-perguruan>
- Kompas.com. (2021). Rektor Binus ancam cabut gelar sarjana bagi alumni yang korupsi. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/10/24/155048078/rektor-binus-ancam-cabut-gelar-sarjana-bagi-alumni-yang-korupsi>
- Kompas.com. (2023). Mahfud ungkap modus pencucian uang di Kementerian: Beli proyek dan bikin perusahaan cangkang. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/11/20485371/mahfud-ungkap-modus-pencucian-uang-di-kementerian-beli-proyek-dan-bikin>
- Kunnummal, A. (2017). A critical decolonial reading of liberation, in the Islamic liberation theology, Works of Asghar Ali Engineer, Shabbir Akhtar, Farid Esack and Hamid Dabashi. Unpublished doctoral dissertation, University of Johannesburg, South Africa. Diakses dari <https://hdl.handle.net/10210/493515>.
- Gie, K K. (2004, Agustus 4). KKN akar semua permasalahan bangsa. *Kompas*, 4. <https://antikorupsi.org/id/article/kkn-akar-semua-permasalahan-bangsa-040804>.
- Lakens, D. (2017, January 10). Examining non-significant results with Bayes Factors and Equivalence Tests. Diakses dari <http://daniellakens.blogspot.com/2017/01/examining-non-significant-results-with.html>.
- Lakens D. (2019). The value of preregistration for psychological science: A conceptual analysis. *Japanese Psychological Review*, 62, 221–230. https://doi.org/10.24602/sjpr.62.3_221.
- Leahy, L. (2002). *Horison manusia*. Kanisius.
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301-322. https://www.researchgate.net/publication/258142264_Transparency_Is_Not_Enough_Making_Transparency_Effective_in_Reducing_Corruption.
- Lokanan, M. E. (2015). Challenges to the fraud triangle: Questions on its usefulness. *Accounting Forum*, 39(3), 201–224. Diakses dari <https://viurrspace.ca/handle/10613/5101>.
- Macabasco, L. W. (2021). 'They become dangerous tools': The dark side of personality tests. Diakses dari <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2021/mar/03/they-become-dangerous-tools-the-dark-side-of-personality-tests>
- Magnis-Suseno, F. (2015). Publikasi di jurnal internasional. *Kompas*. Diakses dari <https://lautanopini.wordpress.com/category/franz-magnis-suseno/>.
- Malaysia Open Science Platform. (2020). What is Malaysia Open Science Platform? Diakses dari <https://www.akademisains.gov.my/mosp/about/what-is-malaysia-open-science-platform/>.
- Marquette, H. (2010). 'Whither morality? 'Finding God' in the fight against corruption'. *Religions and Development Working Paper Series, vol. 41*. University of Birmingham, Birmingham. Diakses dari http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/files/3896981/WP41_complete_for_web.pdf.

- Magnis-Suseno, F. (1984, September 18). Teologi pembebasan. *Kompas*, 4. <http://repo.driyarkara.ac.id/213/>.
- Maslow A. H. (1966). *The psychology of science: A reconnaissance*. Harper & Row. Diakses dari <https://archive.org/details/psychologyofscie00masl>.
- Maslow, A. H. (1970a). *Motivation and personality* (2nd ed.). Harper & Row. Diakses dari https://www.academia.edu/22439303/Motivation_and_Personality_Maslow.
- Maslow, A. H. (1970b). Religion, values, and peak-experiences (2nd ed.). Viking. Diakses dari <https://archive.org/details/religionsvaluesp0000masl>.
- Masyhuri, M. (2016). NU dan paradigma teologi politik pembebasan: Refleksi historis pasca khittah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 158-178. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.727>.
- Merali, Z. (2022, May 11). God, dark matter and falling cats: A conversation with 2022 Templeton Prize Winner Frank Wilczek. *Scientific American*. Diakses dari <https://www.scientificamerican.com/article/god-dark-matter-and-falling-cats-a-conversation-with-2022-templeton-prize-winner-frank-wilczek/>.
- Merdeka.com. (2014, November 10). Ahok: Selain 6 agama masa pura-pura beragama, ini enggak lucu. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-selain-6-agama-masa-pura-pura-beragama-ini-enggak-lucu.html>.
- Moore, C. (2015). Moral disengagement. *Current Opinion in Psychology*, 6, 199-204. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.07.018>.
- Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020, March). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. In *Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)* (pp. 181-200). Atlantis Press. https://www.researchgate.net/publication/339822339_Transparency_in_Government_A_Review_on_the_Failures_of_Corruption_Prevention_in_Indonesia.
- O'Carroll, C., Rentier, B., Cabello Valdès, C., Esposito, F., Kaunismaa, E., Maas, K., ... & Vandeveldel, K. (2017). Evaluation of research careers fully acknowledging open science practices-rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing open science. Diakses dari <https://rri-tools.eu/-/evaluation-of-research-careers-fully-acknowledging-open-science-practices-rewards-incentives-and-or-recognition-for-researchers-practicing-open-scienc>.
- Office of the Chief Science Advisor of Canada. (2020). *Roadmap for open science*. Diakses dari <https://science.gc.ca/site/science/sites/default/files/attachments/2022/Roadmap-for-Open-Science.pdf>.
- Open Scholarship Initiative. (2020). *Open science roadmap: Recommendations to UNESCO*. Diakses dari <https://en.unesco.org/sites/default/files/osi-policy-perspective-3-unesco-open-science-recommendations.pdf>.
- Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349, 6251. <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>.
- Piron, F. (2017). Postcolonial open access. Diakses dari <https://corpus.ulaval.ca/entities/publication/2f42da75-af39-46b1-8ce1-f48ff76c059e>.
- Plucker, J. A., & Makel, M. C. (2021). Replication is important for educational psychology: Recent developments and key issues. *Educational Psychologist*, 56(2), 90-100. <https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1895796>.
- Powell, M. C., & Colin, M. (2009). Participatory paradoxes: Facilitating citizen engagement in science and technology from the top-down? *Bulletin of Science, Technology & Society*, 29(4), 325-342. <https://doi.org/10.1177/0270467609336308>.

- Poynder, R. 2019. Open access: Could defeat be snatched from the jaws of victory? Diakses dari <https://richardpoynder.co.uk/Jaws.pdf>.
- Promesso, G. (2013, Oktober 8). Pemikiran Driyarkara tentang Pancasila. Diakses dari <https://www.slideshare.net/giovannipromesso/pemikiran-dri>.
- Purnamasari, N. (2017, September 27). Terlibat plagiasi disertasi eks Gubernur Sultra, Rektor UNJ dipecat. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-3659622/terlibat-plagiasi-disertasi-eks-gubernur-sultra-rektor-unj-dipecat>.
- RetractionWatch.com. (2022, September 28). Exclusive: Hindawi and Wiley to retract over 500 papers linked to peer review rings. Diakses dari <https://retractionwatch.com/2022/09/28/exclusive-hindawi-and-wiley-to-retract-over-500-papers-linked-to-peer-review-rings/>.
- Rothstein, B., & Torsello, D. (2013). Is corruption understood differently in different cultures? Anthropology meets political science. Working Paper Series 2013:5, QOG The Quality Of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg. Diakses dari https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/38945/gupea_2077_38945_1.pdf?sequence=1.
- Rubin, M. (2017). When does HARKing hurt? Identifying when different types of undisclosed post hoc hypothesizing harm scientific progress. *Review of General Psychology*, 21(4), 308-320. https://www.researchgate.net/publication/320643480_When_does_HARKing_hurt_Identifying_when_different_types_of_undisclosed_post_hoc_hypothesizing_harm_scientific_progress.
- Sabic-El-Rayess, A., & Heyneman, S. P. (2020). Education and corruption. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1637>
- Sari, E. (2016). Kebangkitan politik identitas islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145-156. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/4164>.
- Saputra, A. (2022, September 5). UNJ Kalah Lawan Terpidana Korupsi Eks Gubernur Nur Alam soal Dugaan Plagiat. *DetikNews*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6273179/unj-kalah-lawan-terpidana-korupsi-eks-gubernur-nur-alam-soal-dugaan-plagiat>.
- Schmidt, S. (2017). Replication. In M. C. Makel & J. A. Plucker (Eds.), *Toward a more perfect psychology: Improving trust, accuracy, and transparency in research* (pp. 215–232). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000033-015>.
- Schrögel, P., & Kolleck, A. (2019). The many faces of participation in science: Literature review and proposal for a three-dimensional framework. *Science & Technology Studies*, 32(2), 77-99. <https://doi.org/10.23987/sts.59519>.
- Slater, C. L. (2003). Generativity versus stagnation: An elaboration of Erikson's adult stage of human development. *Journal of Adult Development*, 10(1), 53-65. Retrieved February 18, 2017. https://www.researchgate.net/publication/227244304_Generativity_Versus_Stagnation_An_Elaboration_of_Erikson's_Adult_Stage_of_Human_Development.
- Smart, P., Holmes, S., Lettice, F., Pitts, F. H., Zwiegelhaar, J. B., Schwartz, G., & Evans, S. (2019). Open Science and Open Innovation in a socio-political context: knowledge production for societal impact in an age of post-truth populism. *R&D Management*, 49(3), 279-297. <https://doi.org/10.1111/radm.12377>.

- Smith, D.J. (2007) A culture of corruption: Everyday deception and popular discontent in Nigeria. Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7sdkn?>
- Sommer, U., Bloom, P. B. N., & Arikan, G. (2013). Does faith limit immorality? The politics of religion and corruption. *Democratization*, 20(2), 287-309. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2894967.
- Sood, S. (2020). The psychoinformatic complexity of humanness and person-situation interaction. In J. Kacprzyk (Ed.), *Advances in Information and Communication: Proceedings of the 2019 Future of Information and Communication Conference (FICC)*, (Vol. 1, pp. 496-504). Springer International Publishing. https://www.researchgate.net/publication/327971572_The_psychoinformatic_complexity_of_humanness_and_person-situation_interaction.
- Subagyo, H. (2022, Maret 28). Transformasi perpustakaan dalam mendukung Open Science dan Open Data. Rakornas Perpustakaan Jakarta. *SlideShare*. Diakses dari <https://www.slideshare.net/hendro/transformasi-perpustakaan-dalam-mendukung-open-science-dan-open-data-251452735>
- Sudiarja, A., Subanar, G. B., Sunardi, S., & Sarkim, T. (Eds.). (2006). *Karya lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Swiatkowski, W., & Dompnier, B. (2017). Replicability crisis in social psychology: Looking at the past to find new pathways for the future. *International Review of Social Psychology*, 30(1), 111-124. <https://rips-irsp.com/articles/10.5334/irsp.66>.
- Tackett, J. L., Brandes, C. M., King, K. M., & Markon, K. E. (2019). Psychology's replication crisis and clinical psychological science. *Annual Review of Clinical Psychology*, 15, 579-604. <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095710>.
- Teixeira da Silva, J. A., & Al-Khatib, A. (2019). The Clarivate™ Analytics acquisition of Publons— an evolution or commodification of peer review? *Research Ethics*, 15(3-4), 1-11. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095710>.
- The Britannica Dictionary. (2023). *Trajectory*. Diakses dari <https://www.britannica.com/dictionary/trajectory>.
- Tonelli, D. (2020). Decolonial theology as an ongoing process: The importance of a common narrative. *Annali di Studi Religiosi*, 21, 181-197. https://books.fbk.eu/media/uploads/files/Decolonial_Theology_.pdf.
- Transparency International Indonesia. (2021). Indonesian Government fails to prove its anti-corruption commitment among the member states. Diakses dari <https://ti.or.id/indonesian-government-fails-to-prove-its-anti-corruption-commitment-among-the-member-states/>.
- Transparency International. (n.d.). What is corruption? Diakses dari <https://www.transparency.org/what-is-corruption/>.
- Uiterwaal, F., Niccolucci, F., Bassett, S., Krauwer, S., Hollander, H., Admiraal, F., ... & Hedges, M. (2021). From disparate disciplines to unity in diversity: How the PARTHENOS project has brought European humanities Research Infrastructures together. *International Journal of Humanities and Arts Computing*, 15(1-2), 101-116.
- UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on open science. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>.
- Uygun Tunç, D., Tunç, M. N., & Eper, Z. B. (2021). Is open science neoliberal? *Perspectives on Psychological Science*, 17456916221114835. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17456916221114835>.

- Van Bavel, J. J., Mende-Siedlecki, P., Brady, W. J. and Reiner, D. A. (2016). Reply to Inbar: Contextual sensitivity helps explain the reproducibility gap between social and cognitive psychology. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113, E4935–E4936, <https://doi.org/10.1073/pnas.1609700113>.
- van Koningsveld, J. (2013). Money laundering–‘You don’t see it, until you understand it’: Rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more effective. In *Research handbook on money laundering* (pp. 435-451). Edward Elgar Publishing. https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/14442_31.html.
- Verfaellie, M., & McGwin, J. (2011, December 1). The case of Diederik Stapel. *Psychological Science Agenda*. Diakses dari <https://www.apa.org/science/about/psa/2011/12/diederik-stapel>.
- Von Maur, I. (2021). Taking situatedness seriously. Embedding affective intentionality in forms of living. *Frontiers in Psychology*, 12, 599939. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.599939>.
- Wakeman, S. W., Moore, C., & Gino, F. (2019). A counterfeit competence: After threat, cheating boosts one's self-image. *Journal of Experimental Social Psychology*, 82, 253-265. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.01.009>.
- Walton, G. W. (2013). Is all corruption dysfunctional? Perceptions of corruption and its consequences in Papua New Guinea. *Public Administration and Development*, 33(3), 175-190. https://www.researchgate.net/publication/264658763_Is_All_Corruption_Dysfunctional_Perceptions_of_Corruption_and_Its_Consequences_in_Papua_New_Guinea.
- Widyarsono, A. (2023, Maret 7). Filsafat Pancasila menurut Prof. N. Driyarkara | Pekan Kelas Terbuka Filsafat STF Driyarkara [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=J2Kzuths95c>.
- Wieringa, S. E., & Katjasungkana, N. (2018). *Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil*. Taylor & Francis.
- Williams, A. (2021). Corruption definitions and their implications for targeting natural resource corruption. Targeting Natural Resource Corruption (TNRC). Diakses dari <https://www.cmi.no/publications/file/7849-corruption-definitions-and-their-implications-for-targeting-natural-resource-corruption.pdf>.
- Williams, C. C., Martinez-Perez, A., & Kadir, A. (2016). Does bribery have a negative impact on firm performance? A firm-level analysis across 132 developing countries. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 22(3), 398-415. https://www.researchgate.net/publication/301535201_Does_bribery_have_a_negative_impact_on_firm_performance_A_firm-level_analysis_across_132_developing_countries.
- Yarkoni, T. (2012a). Psychoinformatics: New horizons at the interface of the psychological and computing sciences. *Current Directions in Psychological Science*, 21(6), 391-397. <https://doi.org/10.1177/0963721412457362>.
- Yarkoni, T. (2012b). Psychological Science Needs A Seat at the Informatics Table. *APS Observer*, 25. <https://www.psychologicalscience.org/observer/psychological-science-needs-a-seat-at-the-informatics-table>.

Ucapan Terima Kasih

Akhir kata, saya memanjatkan syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta, atas segala rahkmat dan amanat yang dititipkan-Nya kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengiringi dan mendukung saya sepanjang saya menempuh karier akademik saya:

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. dan Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M., selaku Rektor dan Wakil Rektor bidang Pengembangan Akademik BINUS University, sekaligus Ketua dan Sekretaris Senat, yang telah memberikan berbagai masukan serta persetujuan pengusulan jabatan akademik saya;

SegeNap Wakil Rektor serta Pimpinan Yayasan Bina Nusantara dan BINUS Higher Education;

Anggota Senat Universitas Bina Nusantara, yang telah menyetujui usulan kenaikan jabatan akademik ke jenjang Guru Besar;

Para Guru Besar Tamu, Prof. Drs. Koentjoro Soeparno, M.B.Sc., Ph.D., Psikolog, Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog, dan Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog. Ibu dan Bapak bukan tamu biasa, melainkan penasihat, pamong, dan pendorong yang sangat kuat hingga saya diganjar jabatan akademik ini. Untuk itu, saya haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga;

Direktur Penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Bapak Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, S.I.K., S.Psi., M.H., yang senantiasa terbuka untuk berdiskusi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia;

(Alm.) Dr. Johannes A. A. Rumeser, M.Psi., yang telah menerima dan membina saya pada awal karier saya di Fakultas Psikologi, BINUS University;

Ibu Dr. Elisa Carolina Marion, S.S., M.Si., selaku Dekan Fakultas Humaniora, BINUS University, yang senantiasa menyediakan diri untuk berdialog; saya teringat salah satu bincang-bincang akrab dengan Ibu di ruang beliau di Kampus BINUS Kijang, sewaktu awal proses pengajuan Guru Besar di Senat dan pada saat yang sama sedang proses promosi dan transfer saya ke jabatan baru di Vice Rectorate - Research and Technology Transfer sebagai Kepala Kelompok Riset Perilaku Konsumen dan Etika Digital;

Bapak Raymond Godwin, S.Psi., M.Si., selaku Wakil Dekan, juga Ketua Jurusan Psikologi BINUS University (2012 sampai dengan 2022), yang telah memberikan sejumlah kepercayaan dan banyak masukan kepada saya sejak saya sebagai SCS (*Subject Content Specialist*) Research Methods, SCC (*Subject Content Coordinator*) Community Psychology, hingga *Lecturer Specialist-S3*;

Ibu Dr. Esther Widhi Andangsari, M.Si., Psikolog, selaku Ketua Jurusan Psikologi BINUS University; untuk pertama kalinya saya mengajukan aplikasi ke BINUS kepada Ibu, kala itu sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi. Juga kepada sahabat-sahabat dosen Jurusan Psikologi BINUS University sejak zaman kepemimpinan Jurusan oleh Bapak Reza Indragiri Amriel, yang telah merajut kebersamaan hingga saat ini;

(Pak Jo, Ibu Elisa, Pak Raymond, dan Ibu Esther adalah pihak-pihak di tingkat Fakultas dan Jurusan yang telah mengusulkan serta mengawal perjalanan karier akademik saya, khususnya Lektor Kepala dan Guru Besar);

Para guru saya, (Alm.) dr. Pandu Setiawan, Prof. Mochamad Enoch Markum, Dr. Nani Nurrachman, Dr. Erastus Sabdono, Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, dan tokoh-tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Guru-guru saya telah menjadi teladan bagi saya baik di bidang Catur Darma Perguruan Tinggi bahkan spiritualitas hidup;

Ibu/Bapak Pimpinan di berbagai Fakultas Psikologi; Dr. Tatie Soeranti (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Dr. Anwar Prabu Mangkunegara (Universitas Mercu Buana), Dr. Silverius Y. (Sonny) Soeharso (Universitas Pancasila), Dr.Phil. Juliana Murniati (Universitas Atma Jaya), dan Yonathan Aditya, Ph.D. (Universitas Pelita Harapan), yang membuka kesempatan dalam perjalanan awal karir saya di bidang akademik, sebelum saya berkarya di BINUS University;

(Secara khusus, Ibu Tatie dan Bapak Bonar Hutapea yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membangun Fakultas Psikologi Ubhara Jaya selaku Wakil Dekan merangkap Ketua Program Studi Periode 2008-2011)

Ibu/Bapak Pimpinan organisasi profesi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia; yang telah memberikan amanat kepada saya di bidang profesi. Saya berkarya sebagai pengurus di HIMPSI sejak di tingkat Wilayah DKI Jakarta dan Ikatan Psikologi Sosial serta Pengurus Pusat sejak tahun 2007 hingga saat ini, di bawah binaan berturut-turut: Drs. Lukman S. Sriamin, M.Psi. (HIMPSI Jaya), Drs. Jo Rumeser, M.Psi. (HIMPSI Jaya), Prof. Dr. Hamdi Muluk (Ikatan Psikologi Sosial), Dra. Dra. Retno Suhapti, M.A. (PP HIMPSI), Prof. Dr. Seger Handoyo (PP HIMPSI), dan Dr. Andik Matulesy (PP HIMPSI); tidak lupa, di Kompartemen, di bawah binaan Prof. Dr. Augustinus Supratiknya dan Dr. Tjipto Susana. Juga di LSP Psikologi Indonesia, di bawah binaan Prof. Dr. Fendy dan Prof. Dr. Yusti Probowati Rahayu;

Teman-teman di Lecturer Resources Center (LRC) BINUS University yang telah mendukung segala proses pengajuan Jabatan Akademik saya, khususnya pada jenjang Lektor hingga Guru Besar. Untuk itu, saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Olifia Rombot, Ibu Yuliana Lisanti, M.I.T.M., Bapak Dedy Suryadi Lukman, Ibu Sri Utari, Bapak Ari Syharial, Ibu Ika Triana, serta teman-teman LRC yang lain; juga kepada tim yang turut mempersiapkan kegiatan pengukuhan ini, diantaranya Ibu Nyoman Ayu Gita Gayatri, M.Kom., Ibu Yuni Atikah, dan Ibu Eva Rustina Hutajulu;

Bapak Drs. Suyanto, Dosen PA (Penasihat Akademik) saya baik secara formal maupun informal selama saya menjalani perkuliahan Sarjana di Universitas Persada Indonesia YAI. Bapak lah yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk menentukan jalur mata kuliah serta kelas yang hendak saya ikuti;

Dosen-dosen saya di Universitas Persada Indonesia YAI (2002-2007), khususnya Bapak Bonar, Ibu dr. Ratna Mardiaty Soemardi, Ibu Febriyani, Bapak Dr. dr. Dharmawan Ardi Purnama, Prof. Dr. Agus Djoko Santoso, (Alm.) Ibu Sonniaty Natalya Manalu, Bapak Togiariatua Nainggolan, Bapak Drs. S. S. Sulistiyono, Ibu Dra. Sumarningsih, serta seluruh dosen lain yang telah membuat saya kerasan untuk belajar Psikologi pada awal-awal saya masuk ke Fakultas Psikologi, setelah saya gagal masuk ke Fakultas Kedokteran;

(Alm.) Prof. Dr. dr. Hari Kusumandyoko Lasmono, M.S., FIAS. dan Bapak Dr. Ide Bagus Siaputra, sahabat-sahabat saya dari Universitas Surabaya. Prof Hari dan Pak Bagus senantiasa mendukung nyaris apapun yang saya gagas dan usulkan; komentar-komentar Prof dan Bapak senantiasa bernas, sering menggelitik, sekaligus penuh kehangatan. Secara khusus, kenangan lisan maupun tulisan bersama Prof. Hari (sosok orangtua bagi saya) tentu akan senantiasa terpatrit dalam ingatan;

Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., yang telah mendampingi saya sejak pengajuan Lektor Kepala, serta mempercayai saya sebagai RIG Leader di bawah kepemimpinan Bapak. Prof. Tirta, saya menghaturkan banyak terima kasih atas segenap kepercayaan termasuk ketika mendirikan komunitas epistemik ICOBAR (International Conference on Biospheric Harmony);

Tim Sains Terbuka Indonesia, Bapak Dr. Dasapta Erwin Irawan (Institut Teknologi Bandung), Bapak Surya Dalimunthe, Bapak Dr. Sandersan Onie, Ibu Rizqy Amelia Zein, Bapak Hendro, dan kawan-kawan, yang pada masa-masa awal sains terbuka di Indonesia telah bersama-sama membangun landasan serta efikasi kolektif bagi gerakan moral dan sosial ini;

Tim Research and Technology Transfer Office (RTTO) yang telah mendukung segala proses di bidang riset dan publikasi, (Alm.) Prof. Ir. Bahtiar Saleh Abbas, M.Sc., Ph.D., Ibu Nurlina, Ibu Aninda Rahmasari, Bagas Rizky Ramadhan, Bapak Brilly Andro Makelew, Bapak Supria, Bapak Haryo Sutanto, Bapak Elioenai Sitepu, Ibu Fransisca Sinaga, Ibu Erma Lusia, Ibu Ria Damayanti, (d/h). Bapak Anindito dan Ibu Desi Maya Kristin, dan semua anggota tim BINUS Research dan Research Interest Group (RIG);

Prof. Dana Santoso Saroso, M.Eng., Ph.D. dari Yayasan Universitas Siber Indonesia Pratama (Cyber University) beserta Bapak Dr. Ir. Erry Rimawan dan Ibu Erika Mediana dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Ibu dan Bapak telah memantau perkembangan saya sejak saya berkarya di Mercu Buana Training & Consulting ("UMB Menteng") tahun 2007, hingga saat ini;

Ibu dan Bapak Guru saya, sejak saya bersekolah di SD sampai SMA. Secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih teramat besar atas kehadiran guru-guru saya yang menemani perjalanan intelektual saya, khususnya sejak Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Katholik Ricci I. Terima kasih kepada (Alm.) Bapak Drs. Bambang Sungkono, Ibu Anastasia Wijayanti, S.Pd., M.M., Ibu Yuliana Widiyanto, S.Pd., Bapak Hubertus Suratno, (Alm.) Ibu Puruhita Latini, Bapak Antonius Sukahar (Pembina OSIS SMP), Bapak Bambang (Guru BK SMP), Bapak Damianus Daru, Ibu Astuti, Ibu Herny Lesmana, S.Psi., M.M., serta seluruh guru lain. Saya tidak mungkin tabah menempuh "perjalanan ini" (lagu Ebiet G. Ade yang saya nyanyikan sewaktu retret SMP) tanpa asuhan Ibu dan Bapak semua.

Bapak Djati Adi Wicaksono, M.Inf.Sys., A.W.P., C.W.P., yang telah mempercayai saya untuk menjadi Pengajar di Lembaga Sertifikasi Internasional Webmaster pada tahun 2001, kemudian menjadi partner instruktur di MBTC. Tanpa beliau, saya tidak mungkin mengenal arti penting murid bagi pengajar sejak dini.

Teman-teman yang telah mendedikasikan video testimoni bagi saya (selain nama-nama yang saya sebutkan di atas): Bapak Ontoseno, Ibu Megawati Santoso, Bapak Martiono Hadianto (Ketua Yayasan PPM Manajemen 2016-2019), Ibu Indrya Mulyaningsih (PPJB SIP), Ibu Emmy Lucy Smith (Wahana Visi Indonesia), Ibu Terdi Selidevi Silalahi (Kementerian Keuangan), Cindy Carneta (Mawapres BINUS 2022).

Terpenting, keluarga saya, Ibu T. L. Tjen dan ayah (Alm.) Bapak D. Abraham, adik saya, serta secara khusus belahan jiwa saya, RR Maria Kartika, yang telah mencintai saya dengan sepenuh hati di tengah-tengah banyak ketidaksempurnaan yang saya miliki;

Di samping itu, ada banyak sekali pihak yang terlibat dalam perjalanan akademik dan profesi saya, serta seluruh tim kepanitiaan (Pak Gandy, Pak Joko, Pak Rizki, Lulu, Lovademica band, dst) yang terlibat dalam pengukuhan Guru Besar ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu; baik mahasiswa, alumni, rekan-rekan dari sektor pemerintahan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun media massa. Kepada Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari semua, saya haturkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahkmat, amanat, dan ampunan-Nya kepada kita semua.

Brief Curriculum Vitae

Juneman Abraham

Pendidikan

No	Bidang Minat dan Institusi	Gelar	Lulus Tahun
1	Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia	Dr.	2018
2	Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia	M.Si.	2011
3	Psikologi Klinis, Fakultas Psikologi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I.	S.Psi.	2007
4	Ilmu Pengetahuan Alam, SMU Katolik Ricci I		2001
5	SMP Katolik Ricci I		1998
6	SD Kemurnian		1995
7	SD JOY		1995
8	Certified Webmaster Professional (CWP), WebmasterCertification		2002
9	Certified International Research Reviewer (CIRR), Kemristek/BRIN-LSP Quantum-Komite Akreditasi Nasional		2019
10	Certified Designer and Facilitator on Community Development (Perancang dan Fasilitator Pengembangan Komunitas), Badan Nasional Sertifikasi Profesi		2021
11	Certified Assessor of Competency (Asesor Kompetensi), Badan Nasional Sertifikasi Profesi		2019 dan 2022
12	Certified Ethics Teacher of UNESCO		2017
13	Certified on Data Stewardship for Open Science, ISTIC-UNESCO		2021
14	Certificate on Scientometrics, Universiteit Leiden		2019

Penelitian

Bidang minat:

- Psikologi Korupsi, Integritas, dan Sains Terbuka
- Psikoinformatika
- Psikologi Kebijakan Publik
- Psikologi Konsumen
- Psikologi Sosial lain-lain

Telah menerbitkan lebih dari 130 publikasi ilmiah sejak tahun 2008, dalam bentuk buku, artikel jurnal, prosiding, dan sebagainya, dan dapat diakses bebas melalui <https://bit.ly/profabraham>

Pengabdian kepada Masyarakat

Bidang kiprah:

- Psikoedukasi Antikorupsi
- Sains Terbuka
- Kesehatan Jiwa/Mental
- Etika Riset dan Publikasi
- Penerimaan Teknologi
- Psikologi Sosial lain-lain

Riwayat pengabdian dapat diakses melalui <https://scholar.binus.ac.id/lecturer/D3728/prof-dr-juneman-abraham-spsi-msi/>

Penghargaan

- Profesor termuda LL Dikti Wilayah III, 2022.
- Publons Peer Review Award 2018 by Publons/Clarivate Analytics (Web of Science Group)
- Publons Peer Review Award 2017 by Publons/Clarivate Analytics (Web of Science Group)
- Rector's Award for The Best Teaching Performance, BINUS University, 2017
- Representation of BINUS University in "Pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah III Bidang Ilmu Sosial", 2018
- Best paper-2nd runners-up. ASEAN Conference on Environment-Behavior Studies, 18-21 March 2013, Association of Behavioural Researchers on ASIANS (ABRA).
- Best paper-1st runners-up. AMER International Conference on Quality of Life, 6-7 April 2013, Association of Malaysian Environment-Behaviour Researchers.

Pengalaman Industrial dan Pemerintahan

- Consultant of PT Mondelez Indonesia for CSR Revitalisasi Taman Kota di Indonesia (2018)
- Expert Team and Consultant of Kementerian Sosial RI for Evaluasi Program Keluarga Harapan di Tujuh Propinsi di Indonesia (2012)
- HR Staff PT ISKI (2005-2006)
- Project Associate of PT Magnifico Indonesia handling the building of Fakultas Psikologi Universitas Indonesia web site (2004-2005)
- Certified Webmaster Instructor (2002-2005) of PT Daya Bina Mitra Infonet/ WebmasterCertification.
- Supporting *Ad hoc* Reviewer at KemenristekDikti / KemenristekBRIN / Kemendikbudristek (2019-now)

Pengajaran (riwayat)

- Universitas Bina Nusantara
- Sekolah Tinggi Pemerintahan dan Kebijakan Publik
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Universitas Mercu Buana
- Universitas Atma Jaya
- Universitas Pancasila
- Universitas Pelita Harapan

